



U4 Issue 2019:15

Mendorong Pendekatan Sensitif Gender Untuk Memberantas Korupsi Di Sektor Kehutanan

Oleh Monica Kirya
Editor seri: Sofe Arjon Schütte

CMI CHR.
MICHELSEN
INSTITUTE

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi


kerja sama
jerman
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

implemented by:

giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Issue U4 ini adalah salah satu dari beberapa publikasi yang dihasilkan dari 'proyek C-files'. Proyek ini didanai oleh Kerjasama Internasional Jerman dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia, dan bekerja sama erat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, proyek menyediakan penelitian dan analisis korupsi sektor kehutanan .

Pernyataan Penyangkalan

Semua pandangan dalam teks ini adalah milik penulis dan bisa berbeda dengan lembaga mitra U4.

Lembaga Mitra

Australian Government – Department for Foreign Affairs and Trade – DFAT
(Australian Government – Department for Foreign Affairs and Trade – DFAT)
German Corporation for International Cooperation – GIZ (German Corporation for International Cooperation – GIZ)
German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development – BMZ
(German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development – BMZ)
Global Affairs Canada (Global Affairs Canada)
Ministry for Foreign Affairs of Finland (Ministry for Foreign Affairs of Finland)
Ministry of Foreign Affairs of Denmark / Danish International Development Assistance – Danida (Ministry of Foreign Affairs of Denmark / Danish International Development Assistance – Danida)
Swedish International Development Cooperation Agency – Sida (Swedish International Development Cooperation Agency – Sida)
Swiss Agency for Development and Cooperation – SDC (Swiss Agency for Development and Cooperation – SDC)
The Norwegian Agency for Development Cooperation – Norad (The Norwegian Agency for Development Cooperation – Norad)
UK Aid – Department for International Development (UK Aid – Department for International Development)

Tentang U4

U4 adalah sebuah tim yang berisi tenaga ahli anti korupsi yang bekerja membagikan hasil penelitian beserta bukti-buktinya guna membantu mitra pembangunan internasional mendapatkan hasil berkelanjutan. Pekerjaan itu melibatkan dialog, publikasi, pelatihan online, lokakarya, helpdesk, dan inovasi. U4 adalah pusat permanen di Chr. Institut Michelsen (CMI) di Norwegia. CMI adalah lembaga nirlaba penelitian multi-disiplin dengan ilmuwan sosial yang berspesialisasi pada studi pengembangan.

Foto sampul

CIFOR (CC by-nc-sa) <https://flic.kr/p/YBB9NM>

Kata Kunci

natural resource management - gender - forestry

Jenis Publikasi

U4 Issue

Creative commons



Karya ini dilisensikan dengan Atribusi Creative Commons-NonCommercial-Lisensi Internasional NoDerivatives 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)

Korupsi di sektor kehutanan memicu deforestasi, dengan dampak yang merugikan masyarakat dan khususnya perempuan. Namun, tata kelola hutan yang didominasi laki-laki menyebabkan intervensi anti-korupsi merugikan perempuan dan menghambat kemajuan upaya konservasi hutan. Meningkatkan kesetaraan gender di bidang kehutanan dapat membantu mengurangi korupsi dan degradasi hutan. Donor, pemerintah, dan masyarakat sipil dapat mendukung pendekatan sensitif gender dengan tata kelola kehutanan yang mengintegrasikan gender ke dalam prakarsa anti-korupsi dan memastikan inisiatif kesetaraan gender memandang korupsi sebagai ancaman bagi tujuan mereka.

Poin utama

- Inisiatif anti-korupsi di sektor kehutanan sering mengabaikan jenis kelamin, sementara upaya mengintegrasikan aspek gender ke dalam kegiatan kehutanan tidak selalu memandang korupsi sebagai hambatan utama konservasi hutan dan kesetaraan gender.
- Penelitian ini menunjukkan hubungan antara minimnya pemberantasan korupsi dan tingginya tingkat deforestasi. Pembalakan liar, jenis korupsi kehutanan paling umum, menggunduli tutupan hutan, yang berimplikasi buruk terhadap upaya global menghadapi perubahan iklim.
- Deforestasi juga merusak mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada hutan dengan mengurangi akses mereka ke produk hutan kayu dan non-kayu. Dalam hal ini, perempuan mengalami dampak terburuk.
- Meningkatkan partisipasi perempuan dalam lembaga-lembaga kehutanan masyarakat dapat memperbaiki tata kelola hutan dan kelestarian sumber daya. Namun, tidak cukup hanya menyertakan perempuan; mereka harus berpartisipasi aktif dan bermakna.
- Risiko korupsi harus dipertimbangkan ketika merancang dan menerapkan inisiatif yang bertujuan memberdayakan perempuan dan mendorong kesetaraan gender di sektor kehutanan.
- Donor dapat mendanai inisiatif lembaga internasional, pemerintah, masyarakat sipil, dan peneliti akademisi yang mendorong pendekatan sensitif gender dalam pemberantasan korupsi di sektor kehutanan.

Daftar isi

Meneliti hubungan antara gender dan korupsi	1
Korupsi di sektor kehutanan	4
Pembalakan liar	5
Penipuan dan penyalahgunaan dana dalam program konservasi kehutanan	7
Elite capture (penguasaan elit)	8
Tanggapan terhadap korupsi kehutanan	9
Gender dan kehutanan	11
Gender dan pemanfaatan hutan	12
Gender, partisipasi, dan pengelolaan hutan masyarakat	14
Gender dan konservasi hutan	15
Gender dan keadilan iklim	17
Dinamika gender dalam korupsi kehutanan	19
Keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam tindakan korupsi	19
Dampak korupsi berbasis gender di sektor kehutanan	20
Menuju pendekatan terpadu untuk gender, kehutanan, dan korupsi: Saran untuk penelitian, kebijakan, dan praktik	22
Memadukan gender, kehutanan, dan korupsi dalam penelitian dan analisis akademis melalui ekofeminisme	23
Mengintegrasikan gender ke dalam analisis ekonomi politik dan kekuasaan serta pengaruh di sektor kehutanan	26
Mendorong pendekatan sadar dan inklusif gender untuk inisiatif anti-korupsi kehutanan	27
Mendorong keterlibatan perempuan dalam gerakan anti-korupsi di sektor kehutanan	32
Manajemen risiko korupsi untuk pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender program di sektor kehutanan	33
Rekomendasi	34
Donor dan badan-badan multilateral	34
Pemerintah	34
Aktivis, LSM, dan organisasi masyarakat sipil	35
Peneliti dan ilmuwan	35
Referensi	36

Tentang penulis

Monica Kirya

Ucapan terima kasih

Esse Nilsen, Sophie Lemaitre, Lena Karlsson, Ingrun Hattenbach Åslund, Anna Petherick, Metta Yanti, Judhi Kristantini, dan Putri Rahayu memberikan komentar dan saran bermanfaat pada berbagai tahap penulisan makalah ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Sofie Schuette dan Cathy Sunshine.

Meneliti hubungan antara gender dan korupsi

Selama hampir dua dekade, komunitas pelaku pembangunan telah memperdebatkan hubungan sistematis antara ketidaksetaraan gender dan korupsi. Perdebatan mulai merebak pada 2001 dengan terbitnya dua studi yang mengeksplorasi korelasi ini dan menyimpulkan bahwa rendahnya tingkat korupsi terkait dengan tingginya jumlah perempuan yang aktif di parlemen nasional, kantor publik dan angkatan kerja pada umumnya.¹ Penelitian itu didasarkan pada analisis data Bank Dunia untuk indeks kesetaraan gender dan Indikator Tata Kelola Dunia.² Studi melahirkan sejumlah kontroversi: bagi para pengkritiknya, temuan ini sepertinya menyiratkan gagasan meragukan bahwa perempuan secara inheren lebih tidak korup dibanding laki-laki,³ jenis kelamin yang 'lebih adil dan lebih bersih,'⁴ yang kini bisa berfungsi sebagai 'kekuatan anti-korupsi baru.'⁵ Namun, studi ini memiliki metodologi yang kuat dan memasukkan kontrol atas faktor penjelas lain seperti kebebasan sipil, pendapatan, dan pendidikan. Kajian lebih mutakhir telah menyimpulkan hubungan antara jumlah perempuan yang memegang jabatan publik dan tingkat korupsi tergantung pada jenis rezim, dan kian banyak perempuan yang memegang jabatan tingkat kian rendah korupsi di negara-negara demokratis, tapi tidak di negara-negara otoriter.⁶

Analisis selanjutnya kurang memperjelas hubungan partisipasi perempuan dalam kehidupan publik dan tingkat korupsi.⁷ Namun, studi-studi terbaru kembali menegaskan bahwa partisipasi perempuan dalam jabatan publik, termasuk di tingkat pemerintah daerah, berkontribusi terhadap penurunan korupsi, skala kecil maupun besar.⁸ Selain itu, keterkaitan ini terlihat menguat ketika terdapat 'representasi substantif perempuan' meningkat

1. Dollar, Fisman, dan Gatti (2001); Swamy dll. (2001).

2. Peringkat kesetaraan gender didasarkan pada basis data Country Policy and Institutional Assessment (CPIA) Kelompok Bank Dunia. Worldwide Governance Indicators melaporkan enam dimensi pemerintahan, termasuk pengendalian korupsi.

3. Boehm (2015).

4. Esarey dan Chirillo (2013).

5. Goetz (2007).

6. Esarey dan Schwindt-Bayer (2017).

7. Lihat, misalnya, Sung (2003, 2012).

8. Lihat, misalnya, Bauhr, Charron, dan Wängnerud (2019).

besar: yaitu, perempuan tidak hanya menduduki jabatan publik tetapi juga serius memperjuangkan persoalan kaum perempuan, yang ditunjukkan lewat pengeluaran kesehatan, kebijakan ramah keluarga, dan kebijakan cuti hamil.⁹ Karena itu, pengurangan korupsi bukanlah efek langsung dari banyaknya perempuan yang memegang posisi publik, tetapi efek tidak langsung yang terjadi ketika perempuan pemegang jabatan berusaha mewakili perempuan dengan meningkatkan pelayanan pada isu-isu yang menjadi perhatian mereka.

Beberapa studi mutakhir menyiratkan hubungannya bisa jadi sebaliknya, korupsi merupakan penghalang bagi partisipasi perempuan dalam kehidupan publik dan sehingga berkontribusi terhadap ketidaksetaraan gender.¹⁰ Studi ini menjelaskan akibat seksisme perempuan sering dipinggirkan oleh sistem patronase dan jaringan klientelis, mereka tidak punya cukup dana untuk maju dalam pemilihan anggota dewan karena penghasilan mereka lebih rendah dari laki-laki, dan mereka kesulitan terlibat dalam kehidupan publik karena terhalang tanggung jawab keluarga dan norma-norma sosial.¹¹

Sejumlah penelitian berusaha mengkaji apakah perempuan cenderung lebih tidak korup dari laki-laki. Kesimpulannya adalah perempuan memang lebih menghindari risiko dan mungkin lebih menghindari perilaku menipu, tapi kita tidak bisa mengatakan perempuan lebih berintegritas dari laki-laki, karena perempuan adalah kelompok beragam.¹² Namun, perempuan lebih menderita akibat dampak korupsi dibanding laki-laki karena status mereka yang lebih rendah dalam masyarakat, fungsi maternal dan pengasuhan mereka, serta tugas rumah tangga lainnya seperti menyiapkan makanan dan mengambil air.¹³ Efek negatif korupsi bisa langsung, ketika perempuan menjadi korban suap dan *sextortion* (pemerasan seks), dan tidak langsung, ketika korupsi menguras sumber daya yang bisa digunakan untuk meningkatkan kehidupan perempuan.¹⁴

'*Sextortion*,' dan korupsi seksual umumnya, jelas memiliki efek yang tidak proporsional terhadap perempuan dan mulai menarik perhatian banyak peneliti. *International Association of Women Judges* (Asosiasi Internasional Wanita Hakim (IAWJ)) mendefinisikan *sextortion* sebagai 'penyalahgunaan

9. Watson dan Moreland (2014).

10. Bjarnegard (2013). Lihat juga Sundstroom dan Wangnerud (2014).

11. Bjarnegard (2013). Lihat juga Merkle (2018), terutama Bab 3 dan 4.

12. Boehm (2015). Lihat juga Alhassan-Alolo (2007) dan Alatas dkk. (2009).

13. Sierra dan Boehm (2015). Lihat juga Hallerod dkk. (2013).

14. Merkle (2018), Bab. 2.

kekuasaan untuk memperoleh kenikmatan seksual.¹⁵ Istilah ini muncul dari fakta bahkan ketika perempuan tidak memiliki uang untuk membayar suap, mereka memiliki sesuatu yang sebagian orang berkuasa ingin eksploitasi: tubuh mereka.¹⁶ Tahun 2019, untuk pertama kalinya, Laporan Barometer Korupsi Global dari Transparency International untuk Amerika Latin dan Karibia membahas khusus tentang *sextortion*. Mereka melaporkan satu dari lima perempuan pernah mengalami atau mengetahui seseorang yang pernah mengalaminya.¹⁷

Terdorong oleh studi awal awal mereka tentang gender dan korupsi, Bank Dunia telah lama mendorong kebijakan bahwa peningkatan partisipasi perempuan di ranah publik dapat meningkatkan kepatuhan terhadap aturan hukum dan tata kelola yang baik.¹⁸ Namun, aktivis gender dan hak-hak perempuan menolak pendekatan instrumentalis terhadap partisipasi perempuan tersebut. Para aktivis menekankan upaya ini harus didasarkan pada hak asasi perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik, yang dijamin dalam Pasal 7 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap perempuan (CEDAW).¹⁹ Selain itu, meningkatkan jumlah perempuan yang menduduki jabatan publik sebagai cara mengurangi korupsi berisiko mendorong pendekatan ‘tambah perempuan lalu kendalikan’, serta memperkuat stereotip gender tentang sifat dasar perempuan untuk mengorbankan diri dan menghindari risiko.

15. IAWJ (2012), hal. 13.

16. *Sextortion* juga digunakan untuk merujuk kepada kejahatan dengan ancaman mengekspos gambar seksual yang dibuat untuk memaksa korban melakukan sesuatu, atau karena alasan lain seperti balas dendam atau penghinaan. Dalam video penjelasan dari Biro Investigasi Federal Amerika Serikat, agen khusus FBI mendefinisikan *sextortion* sebagai 'kejahatan serius yang terjadi ketika seseorang mengancam mendistribusikan materi pribadi dan sensitif Anda jika Anda tidak memberi mereka gambar yang bersifat seksual, kenikmatan seksual, atau uang.' Ini berbeda dari definisi IAWJ, jadi kita masih perlu klarifikasi konseptual untuk menyusun kebijakan yang tepat.

17. *Transparency International* (2019).

18. King dan Mason (2001).

19. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), Pasal 7. Lihat juga *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), Pasal 25.

Upaya mengurangi korupsi di sektor ini sering mengabaikan gender. Upaya mengintegrasikan gender ke dalam kegiatan kehutanan sering mengabaikan korupsi sebagai hambatan.

Studi yang meneliti hubungan partisipasi perempuan dan korupsi di tingkat sektoral masih minim. Hal ini juga berlaku untuk sektor kehutanan. Akibatnya, upaya mengurangi korupsi di sektor kehutanan sering mengabaikan pentingnya aspek gender, sementara upaya mengintegrasikan gender ke dalam kegiatan kehutanan tidak selalu melihat korupsi sebagai hambatan utama konservasi hutan dan kesetaraan gender. Misalnya, sebuah alat analitik komprehensif tentang kejahatan satwa liar dan kehutanan tidak mempertimbangkan isu-isu gender,²⁰ dan kompilasi artikel terbaru tentang gender dan kehutanan hanya membahas sekilas masalah korupsi.²¹

Issue U4 ini merangkum isu-isu kunci dalam korupsi kehutanan, gender dan kehutanan, serta dinamika korupsi dan gender di sektor kehutanan. Issue ini menekankan pentingnya kerangka tata kelola hutan sensitif gender yang mendorong kesetaraan gender serta transparansi, akuntabilitas, dan integritas terhadap kelestarian hutan, sehingga membantu memperlambat degradasi hutan yang berkontribusi terhadap perubahan iklim.

Korupsi di sektor kehutanan

Ada hubungan kuat antara korupsi dan deforestasi. Sebuah studi 2009 yang menganalisa beberapa indeks korupsi dan tingkat deforestasi tahunan menemukan hubungan substansial antara minimnya pemberantasan korupsi dan tingginya tingkat deforestasi.²² Beberapa penelitian sebelumnya menghasilkan temuan serupa, dan kian banyak studi yang baru mengkonfirmasi korelasi ini.²³ Memang, korupsi, 'penyalahgunaan kekuasaan yang diamanahkan untuk keuntungan pribadi',²⁴ manifes di

20. UNODC (2012).

21. Colfer, Basnett, dan Elias (2016).

22. Koyuncu and Yilmaz (2009).

23. Lihat, misalnya, Meyer, van Kooten, dan Wang (2003), Wright dll. (2007), dan yang terbaru, Sundstrom (2016).

24. Definisi yang lazim digunakan *Transparency International*.

sektor kehutanan terutama dalam bentuk pembalakan liar, yang menggunduli tutupan hutan. Korupsi berimplikasi terhadap upaya global menghadapi perubahan iklim, karena hutan membantu menstabilkan iklim dengan menyerap karbon dioksida dari atmosfer.²⁵ Namun, korupsi di sektor ini juga sarat penipuan dan penyimpangan dana dalam skema konservasi kehutanan seperti REDD +. Selain itu, bentuk lain dari korupsi kehutanan adalah *elite capture* (penguasaan elit) atas proyek pengelolaan kehutanan masyarakat. Kita akan melihat masing-masing secara singkat pada gilirannya.

Pembalakan liar

Pembalakan liar mengacu pada kegiatan penebangan hutan yang 'melanggar konsistensi hukum nasional dan sub-nasional,' bisa dalam bentuk penebangan liar di kawasan lindung hingga memperoleh konsesi secara ilegal.²⁶ Pembalakan juga dapat melibatkan menebang tanaman yang dilindungi, menebang melampaui batas yang dibolehkan, dan menebang pohon berukuran kecil. Kejahatan kehutanan secara lebih luas termasuk perburuan liar serta pengumpulan hasil hutan non-kayu ilegal, tetapi ini tidak akan dibahas di sini secara mendalam.²⁷ Sepanjang rantai pasokan kayu, pembalakan liar sering dikaitkan dengan berbagai jenis pelanggaran lain, seperti ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1: Pembalakan liar dan pelanggaran terkait pada titik asal, transit, dan tujuan

	Pelanggaran hutan	Aktivitas/tindak kejahatan terkait
Asal	Pembalakan dan pemanenan liar	Korupsi
	Kepemilikan ilegal	Penghindaran pajak dan biaya-biaya
	Pengolahan ilegal bahan tanaman	Penipuan dokumen
	Ekspor ilegal	Pencucian uang
Transit	Impor ilegal	Korupsi
	Kepemilikan ilegal	Penghindaran pajak dan biaya-biaya
	Pasokan dan penjualan ilegal	Pemalsuan dokumen
	Pengolahan ilegal	Pencucian uang

25. Bonan (2008).

26. Kleinschmit dll. (2016), Bab. 8, hal. 133.

27. Blaser dan Zabel (2016).

	Pelanggaran hutan	Aktivitas/tindak kejahatan terkait
	Ekspor ilegal	
Tujuan	Impor ilegal Pengolahan ilegal Kepemilikan ilegal Pasokan dan penjualan ilegal	Korupsi Penghindaran pajak dan biaya-biaya Pemalsuan dokumen Pencucian uang

Sumber: Diadaptasi dari UNODC (2012), p. 35.

Penelitian telah menyoroti bahwa korupsi di sektor kehutanan didorong oleh lemahnya tata kelola dan penegakan hukum, di satu sisi, dan besarnya uang yang diperoleh dari hutan dan pohon, di sisi lain.²⁸ Keterpencilan hutan 'memberi banyak kesempatan menjarah yang jauh dari pengawasan publik.'²⁹ Di Indonesia, KPK pada tahun 2015 menemukan bahwa 77–81 % laporan produksi kayu tidak tercatat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Akibatnya negara harus menanggung potensi kerugian negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar US \$ 377 juta – US \$ 520 juta per tahun selama periode kajian (2003–2014). Sementara itu potensi kerugian negara dari nilai kayu komersial yang tidak tercatat sebesar US \$870 juta – US \$ 1.2 miliar per tahun.³⁰ Menurut Interpol, pembalakan liar menyumbang 50–90% dari semua pohon yang ditebang di beberapa negara produsen tropis dan 15–30% secara global. Nilai ekonomi pembalakan liar global, termasuk pengolahan, antara US \$ 30 hingga US \$ 100 miliar, atau 10–30% dari perdagangan kayu global.³¹ Walhasil deforestasi dan degradasi hutan kian merajalela.

Peluang korupsi melalui suap dan pemerasan terbuka lebar pada berbagai tahap rantai pasokan kehutanan, dari desain dan pemberian konsesi operasi dan penebangan, pengangkutan, pengolahan, ekspor, dan penjualan. Suap diberikan untuk memperoleh konsesi, memperoleh izin dari pemerintah daerah, memastikan truk pengangkut lolos pos pemeriksaan, mengekspor atau mengimpor kayu, dan menghindari pajak. Di Indonesia melalui analisis dampak korupsi terhadap regulasi perizinan di sektor kehutanan mulai dari proses perencanaan sampai pengawasan perizinan rentan terhadap suap, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang dan bahkan “korupsi menyandera

28. Interpol (2016).

29. Kishor dan Damania (2007).

30. KPK (2015).

31. UNEP dan Interpol (2012).

negara” (state captured corruption). Akumulasi biaya tidak resmi perizinan mulai dari proses perencanaan sampai pengawasan per konsesi per tahun bisa mencapai US \$ 43 ribu – US \$ 160 ribu.^{32, 33}

Banyak hutan dunia berada di negara-negara di mana korupsi merajalela, terbukti dari rendahnya skor mereka pada Indeks Persepsi Korupsi yang disusun *Transparency International*. Memang, sejumlah pengamat telah menunjukkan bahwa 'kutukan sumber daya' (sedikit atau tidak ada pertumbuhan ekonomi meski sumber daya melimpah) juga terkait erat dengan hutan, karena sumber daya bernilai tinggi ini adalah sumber perburuan rente yang melimpah bagi elit politik, yang menilap dana yang dapat digunakan untuk membiayai layanan publik untuk memperbesar pundi-pundi mereka, menciptakan lingkaran setan deforestasi.³⁴ Namun, korupsi di kehutanan bukan hanya masalah negara berkembang, negara-negara maju yang tergolong berkinerja baik dalam Indeks Persepsi Korupsi, seperti Kanada, juga melaporkan meluasnya pembalakan liar.³⁵

Penipuan dan penyalahgunaan dana dalam program konservasi kehutanan

Dengan insentif yang begitu menggoda untuk korupsi di sektor ini, tidak mengherankan terjadi korupsi pada skema konservasi kehutanan seperti REDD+ (*Reducing emissions from deforestation and forest degradation*/Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan). REDD+ merupakan skema mitigasi perubahan iklim global yang menggunakan mekanisme berbasis kinerja yang memberi penghargaan kepada pemangku kepentingan hutan dari level rumah tangga hingga pemerintah nasional agar melindungi atau meningkatkan kapasitas hutan dalam penyerapan karbon. Penelitian oleh *U4 Anti-Corruption Resource Centre* tentang REDD+ memperingatkan skema ini bisa menciptakan insentif dan peluang baru untuk korupsi di sektor yang sudah sarat dengan praktik korup tersebut.³⁶ Sebuah studi kasus di Republik Demokratik Kongo (DRC) memang mengidentifikasi sejumlah risiko korupsi. Risiko ini

32. KPK (2013)

33. UNEP dan Interpol (2012).

34. Lihat, misalnya, Pendergast, Clarke, dan Van Kooten (2011), yang berpendapat kutukan sumber daya hutan lebih mungkin terjadi di tempat terdapat hutan perawan dibanding yang dalam bentuk perkebunan.

35. Kishor dan Damania (2007).

36. Standing (2012).

termasuk pembayaran suap dan pilih kasih dalam pemberian kontrak konsultasi, pelanggaran *per diem* (tunjangan harian) dalam acara REDD +, politisasi pejabat kehutanan pemerintah, dan salah urus keuangan oleh lembaga kerja sama pembangunan internasional dan organisasi non-pemerintah (LSM) yang mengelola dana REDD +.³⁷ Penelitian lebih lanjut oleh U4 mengidentifikasi potensi korupsi dalam desain mekanisme pembagian keuntungan, identifikasi penerima manfaat, verifikasi data, dan pengelolaan pendapatan.³⁸ Sebuah penilaian risiko korupsi REDD+ di Kenya mengidentifikasi temuan serupa: dana REDD+ berisiko digelapkan, data dan hasilnya dimanipulasi, dan skema ini akan menciptakan insentif praktik perampasan tanah oleh elit.³⁹ Penelitian apakah kekhawatiran tentang korupsi pada skema REDD+ benar-benar terjadi masih minim, meski tulisan yang disebutkan di atas membahas masalah dan perangkap potensial terjadinya korupsi.

***Elite capture* (penguasaan elit)**

Praktik penguasaan elit ditemukan dalam studi proyek konservasi di Desa Ladang Palembang, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, Sumatera, Indonesia. Kepala desa dan pejabat lain meminta kickbacks (suap) dari anggaran proyek hingga 20% dan menarik pembayaran ilegal dari anggota masyarakat yang ingin memperoleh bantuan pengentasan kemiskinan, seperti kompor gas, panel surya, dan beras, yang seharusnya tanpa biaya. Sapi dibagikan ke anggota keluarga, pendukung, dan kroni dari kepala desa. Penguasaan elit ini dimungkinkan oleh hubungan patronase politik yang tumbuh subur lewat proses desentralisasi di Indonesia. Peluang ini memberi elit lokal (kepala desa) peningkatan akses ke sumber daya, tetapi minimnya sistem *check and balances* memungkinkan mereka leluasa mengorupsi proyek-proyek pembangunan.⁴⁰

Penelitian serupa di Odisha, India, menunjukkan bagaimana penguasaan elit membuat kelompok minoritas, yang umumnya berkasta rendah, kian terpinggirkan. Mereka praktis dikeluarkan dari kelompok pemilik hak pengelolaan hutan karena mereka tidak pernah dilibatkan dalam konsultasi publik dan pengambilan keputusan. Akibatnya, mereka tidak diberi

37. Assembe-Mvondo (2015).

38. Dupuy (2014).

39. Kenya Ministry of Environment, Water and Natural Resources (2013).

40. Lucas (2016).

sertifikat tanah, sementara anggota masyarakat lainnya diuntungkan dari program sertifikasi tanah tersebut.⁴¹

Korupsi di sektor kehutanan bisa melibatkan berbagai aktor swasta dan publik, dari tingkat masyarakat hingga ke tingkat internasional.

Karena itu, korupsi di sektor kehutanan bisa muncul dalam berbagai bentuk dan melibatkan berbagai aktor swasta dan publik, dari tingkat masyarakat hingga tingkat internasional. Korupsi tidak hanya mengakibatkan degradasi hutan tetapi juga berkontribusi terhadap ketimpangan karena mencegah kelompok marjinal memperoleh manfaat dari proyek pengembangan masyarakat atau skema berbasis kinerja seperti REDD+.

Tanggapan terhadap korupsi kehutanan

Untuk memberantas korupsi di sektor ini, berbagai pihak telah menyerukan pentingnya respons internasional, karena perdagangan kayu bersifat internasional, dan korupsi hanya dapat ditangani melalui kolaborasi lintas-negara. Program *Forest Law Enforcement, Governance and Trade* (FLEGT/ Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Kehutanan) dari Uni Eropa (UE) bertujuan untuk menyatukan negara pengguna dan negara penghasil kayu untuk memecahkan masalah melalui *Voluntary Partnership Agreements* (VPA/Perjanjian Kemitraan Sukarela) FLEGT bilateral. Perjanjian ini mencakup komitmen dan tindakan dari kedua pihak untuk memberantas terhadap perdagangan kayu ilegal melalui skema lisensi legalitas kayu yang diekspor ke Uni Eropa. Untuk mengeluarkan lisensi FLEGT, negara mitra perjanjian harus menerapkan sistem jaminan legalitas kayu dan langkah-langkah lain yang ditentukan dalam perjanjian. Pada tingkat nasional, sistem jaminan legalitas kayu dibentuk melalui proses partisipatif yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dan mencakup kontrol rantai pasokan, mekanisme untuk memverifikasi kepatuhan, dan audit independen.⁴² Indonesia menjadi negara pertama di

41. Bhalla (2016).

42. Komisi Eropa (2019).

dunia yang memperoleh lisensi FLEGT pada 2016. Beberapa negara penghasil kayu lainnya seperti Kamerun, Republik Afrika Tengah, Ghana, Liberia, dan Republik Kongo juga telah menandatangani Perjanjian Kemitraan Sukarela, sementara Pantai Gading, Republik Demokratik Kongo, Gabon, Laos, Malaysia, dan Thailand masih dalam tahap negosiasi.⁴³

Standar perilaku perusahaan yang diadopsi perusahaan furnitur multinasional seperti IKEA bertujuan memastikan kayu yang mereka gunakan bukan dari sumber ilegal. Standar ini mempersyaratkan sistem pelacakan dan sertifikasi kayu untuk mengonfirmasi kayu berasal dari hutan yang dikelola dengan baik dan berkelanjutan. Namun, upaya korporasi sejauh ini memiliki dampak terbatas membatasi pembalakan liar. Selain itu, ada kekhawatiran praktik ini justru memperkuat kontrol korporasi atas hutan, yang mengarah ke pemanfaatan hutan yang tidak berkelanjutan demi melayani motif keuntungan perusahaan.⁴⁴

Metode lain sedang dicoba adalah menggunakan satelit untuk memantau tutupan hutan, sehingga meningkatkan transparansi di sektor ini. Organisasi masyarakat sipil telah membangun mekanisme pemantauan independen untuk memberantas pembalakan liar dan berperan sebagai *whistleblower* tentang pelanggaran hukum kehutanan.⁴⁵ Pada tingkat nasional, ada upaya mengendalikan pembalakan liar dengan menerbitkan data hutan dan memungkinkan organisasi masyarakat sipil melakukan verifikasi. Masyarakat dimobilisasi untuk mendukung inisiatif konservasi hutan, dan reformasi hukum dan kebijakan telah dilakukan.⁴⁶ Sayangnya, pembalakan liar masih merupakan masalah global serius karena besarnya dari keuntungan perdagangan kayu.

Singkatnya, pembalakan liar, biasanya dilakukan berkolusi dengan pejabat publik, adalah ancaman serius bagi konservasi hutan dan karenanya upaya berkelanjutan untuk mengatasi perubahan iklim. REDD+ bermula sebagai program konservasi kehutanan tetapi berkembang menjadi kontroversial, diduga menciptakan peluang baru bagi korupsi di sektor yang di banyak negara sudah merupakan salah satu yang paling korup. Dahsyatnya tantangan deforestasi dan perubahan iklim mengharuskan kita memperkuat

43. *EU FLEGT Facility* (2019a).

44. Dauvergne dan Lister (2011).

45. Fraser (2014).

46. Fraser (2014).

pendekatan yang ada dan menemukan cara baru dalam bekerja sama melestarikan hutan dan mengatasi pemanasan global.

Deforestasi dan perubahan iklim menuntut kita memperkuat pendekatan yang ada dan menemukan cara baru berkolaborasi.

Gender dan kehutanan

Organisasi seperti *United States Agency for International Development* (USAID) dan *Food and Agriculture Organization* (FAO), sejak tahun 1970-an, mengakui peran penting perempuan di sektor kehutanan dan pentingnya peran gender dan kesetaraan gender dalam kaitannya dengan pohon, hutan, penggunaan lahan, dan lingkungan.⁴⁷ Sebuah panduan FAO yang baru-baru ini diterbitkan tentang pengarusutamaan gender di sektor Kehutanan bertujuan mendorong petugas teknis bantuan kehutanan memastikan proyek-proyek kehutanan melayani kebutuhan perempuan dan bekerja untuk mencapai tujuan kesetaraan gender.⁴⁸ *Centre for People and Forests, Climate Investment Funds*, dan beberapa program REDD+ juga telah menerbitkan panduan serupa.⁴⁹

Center for International Forestry Research (CIFOR) telah melakukan tinjauan literatur penting tentang gender dan kehutanan. Tema-tema yang muncul, dibahas secara singkat di bawah ini, termasuk gender dan pemanfaatan hutan, gender dan pengelolaan hutan masyarakat, dan persimpangan gender, konservasi hutan, dan perubahan iklim, termasuk isu-isu gender dalam REDD +.⁵⁰

47. Hoskins (2016).

48. FAO (2019).

49. FC dan IUCN (tanpa tanggal). Lihat juga CIFOR (2016) serta Marin dan Kuriakose (2017).

50. CIFOR (2013).

Gender dan pemanfaatan hutan

Penelitian menunjukkan gender berpengaruh terhadap bagaimana laki-laki dan perempuan menggunakan sumber daya hutan. Laki-laki dan perempuan terlibat pada berbagai tahap produksi baik untuk produk kayu maupun produk hutan non-kayu, meski keterlibatan ini bervariasi di tiap negara dan tiap komunitas. Studi tentang perbedaan gender dalam kegiatan kehutanan masih sangat terbatas, sehingga tidak mungkin memberikan gambaran atau analisis lintas negara yang komprehensif tentang masalah ini. Namun, ulasan dari data yang tersedia oleh Sunderland dkk. menunjukkan variasi berdasarkan gender serta menurut wilayah yang diamati menggunakan hasil hutan di Afrika, Asia, dan Amerika Latin.⁵¹

Di Afrika, meski berburu dan memancing adalah domain laki-laki, perempuan dan anak perempuan terlibat mengumpulkan tanaman hutan yang dapat dimakan, tanaman obat, makanan ternak, dan buah-buahan. Tanaman yang dikumpulkan perempuan memungkinkan mereka melengkapi makanan keluarga dan mendapatkan penghasilan tambahan bagi rumah tangga mereka. Selain itu, peran perempuan mengumpulkan makanan berarti mereka memiliki pengetahuan mendalam yang khas tentang hutan, pohon, keanekaragaman hayati, dan praktik konservasi.⁵² Perempuan juga mengumpulkan kayu bakar untuk bahan bakar, aktivitas yang sangat menyita waktu dan kerap membuat mereka tidak punya banyak waktu tersisa untuk sekolah, bekerja, atau kegiatan produktif lainnya. Di Zambia, perempuan terlibat dalam produksi arang dari pohon, dan di Cekungan Kongo mereka berperan dalam pertambangan rakyat di kawasan hutan.⁵³ Perempuan di Ghana juga terlibat di tempat pengergajian dan pengolahan kayu, meski peran mereka kurang menonjol dibanding laki-laki yang bekerja di tempat yang sama.⁵⁴ Namun, di Amerika Latin, laki-laki berperan lebih besar dari perempuan dalam mengumpulkan hasil hutan yang belum diolah seperti kayu bakar. Di Asia, kontribusi laki-laki dan perempuan terhadap produksi kurang lebih sama. Sunderland dkk. berhipotesa perbedaan gender dalam pemanfaatan hasil hutan non-kayu tergantung pada tingkat komersialisasi, dengan perempuan mendominasi di Afrika, yang hasil pengumpulan terutama untuk keperluan subsisten, dan laki-laki

51. Sunderland dkk. (2014).

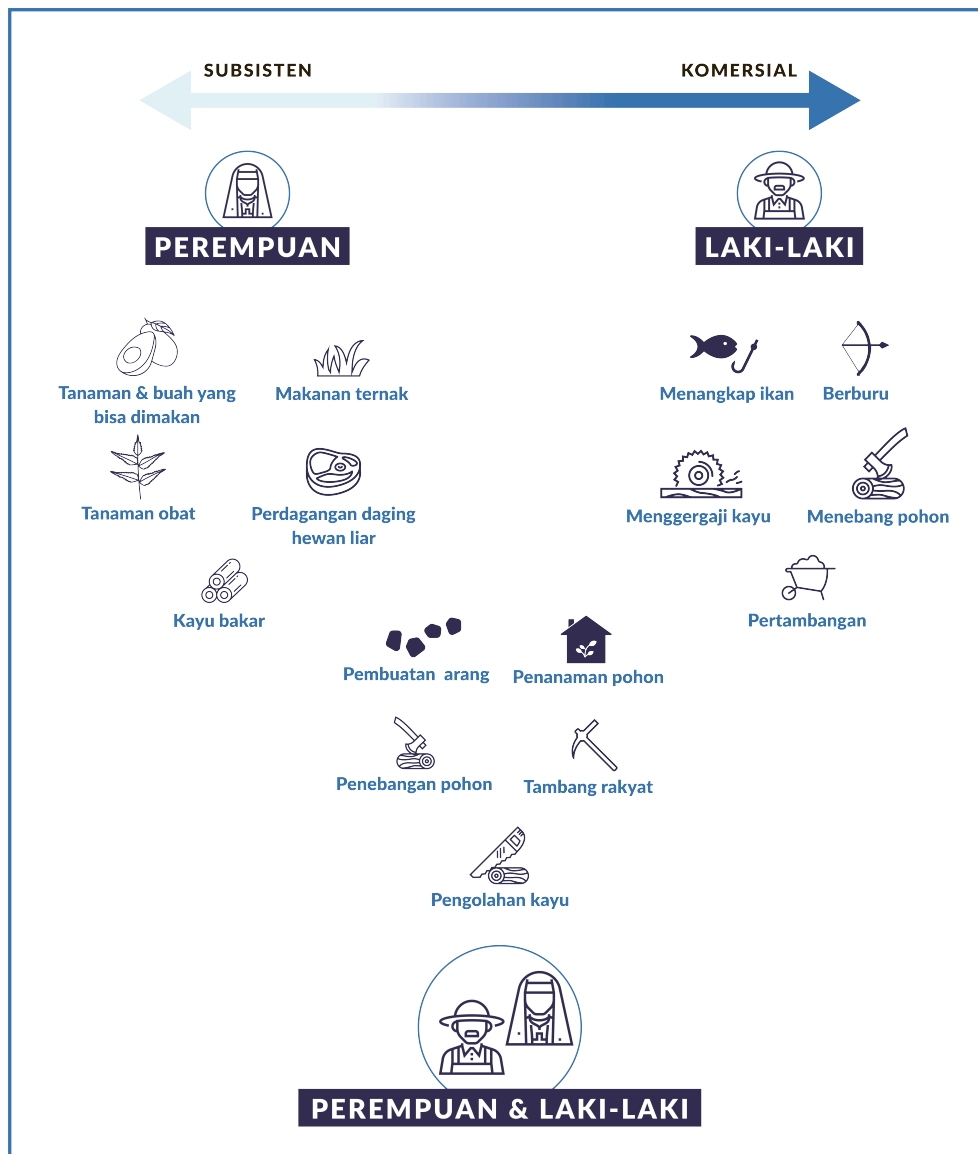
52. FAO (tanpa tanggal), mengutip Sunderland dkk. (2014).

53. Ihalainen dkk. (2018). Lihat juga Ingram dkk. (2011) dan Funoh (2014).

54. Yirrah (2018).

mendominasi di Asia, yang produk-produk hutannya seperti kacang brazil (*Bertholletia excelsa*) memiliki nilai komersial tinggi.⁵⁵

Gambar 1: Gender dan pemanfaatan hutan



Namun, pemanfaatan hutan berdasarkan gender bersifat cair dan berubah tergantung nilai hasil hutan tersebut. Misalnya, di Sierra Leone, program pengumpulan kayu yang seharusnya membantu perempuan - karena mengumpulkan kayu bakar adalah peran perempuan - akhirnya diambil alih laki-laki karena pekerjaan tersebut kini mendatangkan imbalan finansial.⁵⁶ Selain itu, peran gender untuk aspek berbeda dari tenaga kerja dan penggunaannya juga bisa berbeda seiring usia, sehingga, misalnya, anak laki-laki bekerja membantu perempuan paruh baya dalam penanaman dan

55. Sunderland dkk. (2104).

56. Leach (1991).

pemeliharaan pohon.⁵⁷ Kepentingan gender tidak monolitik, karena gender tidak hanya bersilangan dengan usia tetapi juga suku, agama, kekayaan, dan tingkat pendidikan sehingga memberikan hasil berbeda bagi laki-laki dan perempuan.⁵⁸

Gender, partisipasi, dan pengelolaan hutan masyarakat

Pengambilan keputusan di sektor ini menunjukkan pengelolaan hutan masyarakat didominasi laki-laki, tidak hanya karena sebagian besar petugas kehutanan adalah laki-laki, tetapi juga karena minimnya partisipasi perempuan dalam kelompok pengguna hutan. Sebuah analisis lintas negara dan survei rumah tangga di sepuluh negara mengungkapkan tidak dilibatkannya perempuan dari pengambilan keputusan adalah karena hambatan sosial, logistik, dan hukum serta bias laki-laki di antara para penggiat inisiatif kehutanan masyarakat. Wanita lebih mungkin berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tentang hutan jika kepala rumah tangga memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, partisipasi tidak menyita banyak waktu, partisipasi gratis dan tidak butuh biaya, perempuan memiliki akses ke pendapatan sehingga mengurangi ketimpangan pendapatan berbasis gender, dan ada sejarah partisipasi perempuan sebelumnya.⁵⁹

Penelitian menunjukkan partisipasi merupakan proses kompleks. Partisipasi bisa jadi sekedar angka dan berdasarkan kehadiran fisik belaka, atau justru partisipasi efektif yang interaktif dan memberdayakan - yang mendorong lahirnya inisiatif dan penggunaan pengaruh. Gaventa menunjukkan ruang partisipasi tidak netral karena sarat pengaruh kekuasaan, sehingga ruang tersebut bisa tertutup, terbuka berdasarkan undangan, atau diciptakan. Hubungan kekuasaan mendikte apa yang bisa terjadi dalam proses partisipatif dan 'yang bisa berkembang, sesuai identitas, wacana dan kepentingan.'⁶⁰ Kekuasaan di ruang tersebut dapat disembunyikan, terlihat, atau tak terlihat, yang berimplikasi terhadap potensi transformatif dari ruang tersebut.⁶¹

57. Leach (1991).

58. Mwangi dan Mai (2011).

59. Coleman dan Mwangi (2012).

60. Gaventa (2006).

61. Gaventa dan Martorano (2016).

Karena itu, tidak cukup hanya mewajibkan kehadiran perempuan dalam proses pengambilan keputusan; kuncinya adalah memahami dinamika kekuasaan yang membentuk partisipasi mereka. Hal ini karena intervensi untuk meningkatkan partisipasi perempuan pada proyek dan pengambilan keputusan komunitas bisa membawa konsekuensi tak diinginkan terhadap konservasi hutan dan terhadap relasi gender di masyarakat. Misalnya, proyek reboisasi di Nigeria yang menyita banyak waktu perempuan membuat proyek tersebut tidak populer dan menjadi penyebab kematiannya.⁶² Di Kamerun, Ghana, dan Kongo, ketika pendapatan perempuan meningkat akibat proyek-proyek baru, laki-laki mengurangi kontribusi mereka terhadap belanja rumah tangga.⁶³ Di Gambia, di sisi lain, perempuan dengan sumber pendapatan baru 'membeli' kebebasan dari pernikahan yang tidak bahagia. Contoh-contoh ini menunjukkan pentingnya melakukan analisis gender untuk memetakan kemungkinan capaian proyek bisa terkait dengan relasi kuasa dalam masyarakat.

Untuk berpartisipasi secara efektif di sektor kehutanan, wanita perlu pengalaman, keterampilan, dan kepercayaan diri tampil di ranah publik.⁶⁴ Tulisan Agarwal mengusulkan representasi substantif dinilai dari sejauh mana keputusan, proses, dan peraturan memperhitungkan perbedaan peran gender laki-laki dan perempuan, dan massa kritis perempuan cukup memiliki pengaruh berarti, yang bisa tercapai jika perempuan setidaknya 33% dari komposisi kelompok hutan.⁶⁵ Namun, partisipasi bisa menjadi beban tambahan bagi perempuan yang sehari-harinya sudah kewalahan dengan tugas-tugas rumah tangga.⁶⁶ Karena itu, melakukan analisis gender di tiap komunitas sangat penting untuk mewujudkan model partisipasi yang efektif.

Gender dan konservasi hutan

Bukti menunjukkan peningkatan partisipasi perempuan di lembaga-lembaga kehutanan masyarakat meningkatkan tata kelola hutan dan kelestarian sumber daya. Dalam satu studi, masyarakat dengan lebih banyak perempuan di kelompok pengelola hutan memiliki kondisi hutan lebih baik, dan komunitas dengan anggota kelompok semua perempuan memiliki regenerasi

62. Leach (1991).

63. Abbot dkk. (2001), Dei (1994), dan Schoepf dan Schoepf (1988).

64. Agarwal (2010b).

65. Agarwal (2010a).

66. Bolanos dan Schmink (2005).

hutan dan pertumbuhan kanopi lebih baik.⁶⁷ Sebuah studi multinasional di tahun 2016 menemukan perbaikan dalam tata kelola dan konservasi sumber daya alam lokal ketika perempuan berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya.⁶⁸ Sebuah studi terbaru dari Nepal menunjukkan peningkatan kekuatan pengambilan keputusan perempuan di kelompok pengelola hutan menyebabkan penurunan dalam pengumpulan kayu bakar, dan partisipasi perempuan lebih tinggi pada kelompok hutan lebih mendukung keputusan yang memprioritaskan pengambilan kayu bakar berkelanjutan.⁶⁹

Komunitas dengan lebih banyak perempuan dalam kelompok pengelola memiliki kondisi hutan lebih baik. Komunitas dengan kelompok pengelola semua perempuan memiliki hutan yang beregenerasi dengan baik.

Terbatasnya partisipasi perempuan pada kelompok pengelola hutan tidak berarti mereka tidak memiliki kekuasaan atau lembaga. Perempuan telah lama terlibat dalam program konservasi hutan dan penanaman pohon. Gerakan Sabuk Hijau di Kenya yang dipimpin Wangari Maathai memperoleh pengakuan internasional, dan Maathai dianugerahi Hadiah Nobel untuk usahanya melibatkan masyarakat, terutama perempuan, dalam menanam pohon.⁷⁰ Perempuan juga telah memainkan peran kunci dalam gerakan lingkungan di Swedia,⁷¹ India,⁷² Indonesia,⁷³ Amerika Serikat,⁷⁴ dan sejumlah negara lain.

Selain itu, perempuan telah dilaporkan melakukan sabotase terhadap program konservasi yang mengabaikan atau merugikan mereka.⁷⁵ Karena itu tidak cukup hanya mengarusutamakan gender; perlu ada upaya memastikan

67. Agarwal (2009).

68. Leisher dkk. (2016).

69. Leone (2019).

70. Maathai (2003).

71. Peterson dan Merchant (1986).

72. Jain (1984).

73. Arumingtyas (2017).

74. Kennedy (2016).

75. Schroeder (1999), dikutip dalam Harris-Fry dan Grijalva-Eternod (2016).

program memiliki tujuan pemberdayaan khusus bagi laki-laki dan perempuan untuk menghindari konflik atau konfrontasi antar gender karena salah satunya merasa terabaikan.⁷⁶

Gender dan keadilan iklim

Perubahan iklim mungkin merupakan masalah paling krusial yang dihadapi dunia, dan proses kebijakan yang sedang berjalan mengakui bahwa perubahan iklim memiliki dampak berbeda bagi laki-laki dan perempuan, berpotensi memperburuk ketidaksetaraan gender dan meningkatkan kerentanan perempuan. Perempuan pedesaan yang mata pencahariannya bergantung pada hutan menghadapi ancaman serius, karena tutupan hutan terus menurun akibat kebakaran hutan yang bermula dan menyebar di tempat dengan kondisi panas dan kering. Perubahan pola cuaca juga mempengaruhi ketersediaan air, pertanian, dan produksi pangan. Bukti menunjukkan fenomena cuaca ekstrim seperti siklon dan badai, yang menjadi kian sering karena perubahan iklim, lebih berdampak terhadap perempuan dibanding laki-laki karena ada kesenjangan pendapatan dan kerentanan berbasis gender lain yang timbul akibat lebih rendahnya status perempuan dalam masyarakat.⁷⁷

Adaptasi berbasis komunitas memobilisasi masyarakat dari bawah ke atas untuk bersiap dan merespon perubahan iklim. Disesuaikan dengan konteks lokal, pendekatan ini berusaha meningkatkan ketahanan terhadap risiko iklim dengan memperkuat jaringan sosial dan memperkuat hubungan dengan lembaga-lembaga pendukung. Pendekatan ini menggabungkan pengetahuan lokal dan proses pengambilan keputusan lokal terkait persepsi perubahan iklim dan strategi manajemen risiko, seperti mengadopsi varietas tanaman yang lebih tahan kekeringan. Jaringan sosial lokal berfungsi sebagai asuransi setelah terjadinya guncangan. Namun keberhasilan dan dampak adaptasi berbasis komunitas sebagian tergantung pada partisipasi anggota masyarakat dalam pengembangan dan penerapan strategi adaptasi berbasis komunitas, seperti menanam pohon atau memodifikasi praktek pertanian. Dalam hal ini, aspek gender menjadi variabel penting, karena perubahan iklim berdampak berbeda pada laki-laki dan perempuan. Risiko yang ditanggung laki-laki dan perempuan di tingkat rumah tangga atau masyarakat berbeda karena perbedaan peran gender untuk merawat anak,

76. Harris-Fry dan Grijalva-Eternod (2016).

77. Terry (2009).

mengambil air dan kayu bakar, serta produksi, pengolahan, penyimpanan, dan pemasaran pangan. Memang, laki-laki dan perempuan bisa menilai risiko iklim secara berbeda tergantung peran gender dalam masyarakat tertentu. Masalah lainnya adalah partisipasi dalam kegiatan adaptasi berbasis masyarakat sering didasarkan tingkat pendidikan, pendapatan, dan kekayaan, hal dimana perempuan cenderung peringkatnya lebih buruk karena ketidaksetaraan gender yang mengakar.⁷⁸ Baik laki-laki maupun perempuan harus dilibatkan dalam kegiatan adaptasi berbasis komunitas untuk mengatasi perbedaan kebutuhan mereka.

Inisiatif adapasi perubahan iklim REDD+ mengakui partisipasi masyarakat sebagai prasyarat penting keberhasilan skema ini. Namun, salah satu kelemahannya adalah kecenderungan melihat masyarakat secara homogen dan tidak mempertimbangkan perbedaan gender. Hal ini relevan karena REDD+, dengan mengurangi pemanfaatan hutan, dapat berpengaruh negatif terhadap mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada hutan untuk makanan dan pendapatan. Sebuah studi perbandingan global REDD+ di enam negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin menunjukkan perbedaan signifikan pada sejauh mana perempuan berpartisipasi, berpengaruh, dan terwakili dalam pengambilan keputusan di desa dan rumah tangga. Meski perempuan menjadi anggota badan pengambil keputusan di tingkat desa sekalipun, studi ini menemukan pengetahuan mereka tentang REDD+ lebih rendah dari laki-laki yang terlibat dalam studi ini.⁷⁹ Penelitian lain menunjukkan perempuan tidak cukup terwakili dalam proses REDD+, dan saat mereka terwakili, mekanisme partisipatif gagal memperhitungkan isu-isu kekuasaan yang mendasari minimnya suara perempuan di ranah publik, yang membuat partisipasi mereka sekedar pelengkap. Sebagai contoh, analisis dokumen REDD+ di Indonesia menemukan hanya 88 dari 383 yang menyebutkan kata 'gender', dan dari 88 dokumen tersebut, sangat sedikit yang membahas prinsip pengarusutamaan gender secara substansial.⁸⁰ Fakta ini tidak hanya berimplikasi bagi kemampuan perempuan memperoleh manfaat dari REDD+, tetapi juga berdampak terhadap upaya konservasi.⁸¹

Singkatnya, penelitian tentang gender dan hutan menunjukkan gender merupakan hal penting dalam pengelolaan hutan dan konservasi. Perbedaan

78. Bryan dan Behrman (2013).

79. Larson dkk. (2016). Negara-negara yang dianalisa adalah Brazil, Kamerun, Indonesia, Peru, Tanzania, dan Vietnam.

80. Wornell, Tickamyer, dan Kusujiartu (2015).

81. Khadka dkk. (2014).

cara laki-laki dan perempuan memanfaatkan hutan bervariasi di tiap negara, tetapi pola umumnya adalah perempuan menggunakan hutan sebagian besar untuk keperluan subsisten dan laki-laki untuk komersial. Perbedaan antara subsisten dan komersial pada gilirannya memengaruhi konfigurasi peran gender saat keadaan ekonomi berubah dan produk yang sebelumnya tidak memiliki nilai komersial tiba-tiba menjadi berharga. Isu penting lainnya adalah sentralitas mekanisme partisipasi yang efektif dalam pengelolaan hutan, terutama perbedaan pemanfaatan hutan oleh perempuan dan laki-laki dan perbedaan prioritas dan kepentingan. Karena itu, tidak cukup hanya menyertakan perempuan; lebih penting lagi memastikan suara mereka didengar

Dinamika gender dalam korupsi kehutanan

Keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam tindakan korupsi

Mengingat minimnya studi tentang isu ini, sulit memastikan sejauh mana perempuan, dibanding laki-laki, terlibat dalam kegiatan korupsi di sektor kehutanan atau bahkan sejauh mana mereka menjadi korban korupsi terkait hutan. Baik laki-laki maupun perempuan yang tinggal di masyarakat dekat hutan bisa terlibat dalam produksi barang ilegal, penebangan ilegal jenis kayu langka, dan ekstraksi ilegal hasil hutan non-kayu.⁸² Penebangan liar dan kejahatan terhadap satwa liar dalam banyak kasus dilakukan oleh laki-laki karena dominasi mereka dalam penebangan dan berburu secara umum. Penelitian dari Liberia mengungkapkan bahwa perburuan, penebangan, dan pertambangan di hutan secara eksklusif adalah kegiatan laki-laki, sementara perempuan terlibat dalam pertanian, mengumpulkan kayu bakar, memperoleh bahan bangunan, dan mencari jenis tanaman untuk bahan makanan.⁸³ Namun, di beberapa negara perempuan terlibat dalam pembuatan arang, yang sering kali merupakan kegiatan ilegal.⁸⁴

82. Blaser dan Zabel (2016).

83. *African Women's Network for Community Management of Forests* (2014).

84. Ihalainen dkk. (2018).

Dalam beberapa kasus upaya konservasi membuka peluang terjadinya korupsi. Penelitian menunjukkan upaya perlindungan hutan dapat memungkinkan penjaga dan pejabat publik lainnya meminta suap dalam bentuk uang maupun barang dari anggota masyarakat yang mencoba terus menggunakan hutan seperti yang mereka lakukan sebelum mereka hutan menjadi kawasan lindung.⁸⁵ Perempuan sering menjadi korban pemerasan penjaga hutan dan jagawana. Sebuah studi di Odisha, India, berfokus pada masyarakat yang telah dipindahkan dari hutan lindung tetapi terus kembali masuk hutan untuk mengumpulkan hasil hutan non-kayu. Para perempuan melaporkan mereka sering diminta memberikan hasil yang mereka kumpulkan oleh para penjaga hutan yang mereka temui di sepanjang jalan. Penelitian di tempat lain di India, di negara bagian Rajasthan dan Distrik Kandhamal, mengungkapkan masalah yang sama: perempuan tidak lagi memiliki akses ke hutan yang sebelumnya menjadi sumber penghasilan mereka, dan ini sangat mempengaruhi mata pencaharian mereka.⁸⁶ Selain itu, upaya pengendalian kejahatan satwa liar dan perdagangan daging hewan liar di Republik Demokratik Kongo melalui penegakan hukum telah menciptakan peluang bagi tuntutan suap dan pemerasan terhadap perempuan pedagang daging hewan liar.⁸⁷

Dampak korupsi berbasis gender di sektor kehutanan

Sejauh ini bisa disimpulkan perempuan menderita dampak lebih buruk akibat korupsi di sektor kehutanan dibanding laki-laki. Efeknya tidak linear dan tidak langsung, dan dapat disimpulkan dari perbedaan dampak degradasi hutan pada perempuan dan laki-laki. Seperti disebutkan di atas, ada bukti substansial hubungan antara korupsi dan deforestasi; karenanya ada keterkaitan tidak langsung antara korupsi dan efek dari deforestasi.

Pembalakan liar dan deforestasi memiliki efek merugikan langsung pada masyarakat yang mata pencaharian bergantung pada hutan dengan mengurangi akses mereka terhadap kayu dan hasil hutan non-kayu. Ketika akses perempuan ke hutan dibatasi, mereka harus menempuh perjalanan lebih jauh untuk mendapatkan sumber daya yang mereka butuhkan. Mencari kayu bakar adalah salah satu pekerjaan paling menyita waktu bagi

85. Blaser dan Zabel (2016).

86. Bhalla (2016).

87. LaCerva (2016).

perempuan pedesaan; perempuan harus berjalan jauh untuk mencari kayu, sehingga harus menghabiskan lebih banyak waktu dan energi, sehingga tak banyak yang tersisa untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi dan kehidupan masyarakat.⁸⁸ Membawa beban berat kayu bakar atau hasil hutan lainnya dalam jarak jauh juga memiliki efek merugikan pada kesehatan dan kesejahteraan perempuan.⁸⁹

Deforestasi menimbulkan erosi tanah, dengan implikasi negatif terhadap kualitas tanah dan pada gilirannya ketahanan pangan. Perempuan pedesaan di banyak bagian dunia memikul tanggung jawab utama untuk menanam, memanen, memasak, dan menyajikan makanan. Dengan demikian, peningkatan degradasi tanah akibat deforestasi paling berdampak pada perempuan pedesaan yang bergantung jawab atas pertanian subsisten. Erosi tanah juga menyebabkan kontaminasi sumber air bersih, yang membuat sumber air minim menjadi keruh dan berlumpur. Sekali lagi, perempuan bertanggung jawab mengambil air, sehingga sumber air tertimbun lumpur dan terkontaminasi menambah beban pekerjaan rumah tangga dan kian memperburuk pembagian tenaga kerja berbasis gender yang memang sudah timpang.⁹⁰

Pembalakan liar dan deforestasi yang dihasilkannya merupakan penyebab pemanasan dan perubahan iklim global, yang efeknya sudah terasa dan akan semakin berdampak parah bagi perempuan miskin yang tinggal di daerah rawan bencana terkait iklim.⁹¹

Hilangnya pendapatan dan pemasukan pajak dari kayu yang dipanen secara ilegal di seluruh dunia diperkirakan mencapai minimal US \$ 10 miliar per tahun.⁹² Perdagangan kayu ilegal menghalangi pemerintah memperoleh pemasukan yang dapat digunakan untuk menyediakan layanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan, yang telah terbukti memainkan peran kunci dalam pembangunan manusia, khususnya dalam meningkatkan taraf hidup perempuan dan anak perempuan.⁹³

Terakhir, persaingan terhadap sumber daya hutan adalah salah satu penyebab konflik kekerasan di wilayah seperti Republik Demokratik

88. Carr dan Hartl (2010).

89. Wan, Colfer, dan Powell (2011).

90. Samandari (2017).

91. Blaser dan Zabel (2016). Lihat juga Terry (2009) dan Denton (2002).

92. Interpol (2016).

93. King dan Mason (2001).

Kongo. Konflik tersebut berefek tak proporsional terhadap perempuan, yang mengalami horor seksual dan berbasis gender yang tak tergambarkan sejak pecahnya kekerasan ini. Selain itu, para pembalok liar juga terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia seperti di Kongo.⁹⁴ Operasi pembalokan liar di belahan lain dunia seperti Amazon lazim melibatkan pembunuhan, kekerasan, ancaman, dan kekejaman terhadap masyarakat adat yang hidupnya bergantung pada hutan.⁹⁵

Menuju pendekatan terpadu untuk gender, kehutanan, dan korupsi: Saran untuk penelitian, kebijakan, dan praktik

Gerakan perempuan telah mencapai kemajuan besar dalam mengintegrasikan kesetaraan gender dan isu perempuan ke dalam rencana dan proses internasional dan nasional, termasuk yang berkaitan dengan lingkungan. Sejak 1985, PBB, dalam pertemuan Strategi Masa Depan untuk Kemajuan Perempuan di Nairobi, telah mengakui bahwa perubahan alam sangat penting bagi perempuan, mengingat peran mereka sebagai 'perantara antara alam dan masyarakat dalam hal agro-ekosistem, penyediaan air dan bahan bakar yang aman dan sanitasi.'⁹⁶ Beberapa tahun sebelumnya Konferensi PBB 1992 tentang Lingkungan dan Pembangunan, yang dikenal sebagai KTT Bumi Rio, menjadikan isu lingkungan sebagai agenda internasional, namun baru pada dekade terakhir perubahan iklim menjadi agenda global sebagai masalah paling mendesak yang dihadapi umat manusia. Di sisi lain, membatasi korupsi hanya menjadi isu utama dalam agenda pembangunan di akhir 1980-an dan awal 1990-an, yang berpuncak pada adopsi Konvensi Anti-Suap dari Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) pada 1997 dan Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) pada 2003.

Pendekatan gender, hutan, dan korupsi yang lebih terintegrasi diperlukan untuk mengatasi perubahan iklim secara efektif. Mengingat kelangkaan studi tentang bagaimana ketiga hal saling berkaitan, tulisan ini menawarkan saran untuk penelitian lebih lanjut serta untuk memperkuat penyusunan kebijakan dan aktivisme di sektor kehutanan melalui

94. Global Witness (2015).

95. UNEP dan Interpol (2012).

96. PBB (1985).

pendekatan sensitif gender. Saran ini didasarkan, pertama, pada temuan penelitian bahwa ada korelasi kuat antara kesetaraan gender dan pemberantasan korupsi di berbagai sektor. Meski keterkaitannya belum dipahami dengan baik, buktinya sudah cukup menunjukkan bahwa secara umum, meningkatkan kesetaraan gender mengurangi korupsi. Kedua, jelas bahwa korupsi kehutanan memiliki implikasi mengerikan bagi perempuan karena beban lebih berat mereka atas tugas domestik dan fakta bahwa mereka lebih mungkin menjadi miskin. Karena itu mereka lebih rentan terhadap efek merugikan dari degradasi lingkungan, termasuk deforestasi. Ketiga, keterlibatan perempuan dalam tata kelola dan pengambilan keputusan tentang hutan masih sangat rendah meskipun ada upaya untuk terus mendorongnya, dan meski perempuan terlibat dalam kelompok pengelola hutan, partisipasi mereka sering menjadi pelengkap semata dan tidak bermakna. Hal ini berimplikasi negatif terhadap konservasi hutan, karena penelitian menunjukkan hasil konservasi yang lebih baik ketika perempuan terlibat secara bermakna dalam pengambilan keputusan. Temuan ini menggarisbawahi perlunya pendekatan sensitif gender dalam tata kelola hutan, dan di mana perempuan dimasukkan dalam komite kehutanan, partisipasi mereka sering tokenistic dan tidak bermakna. Hal ini memiliki implikasi negatif untuk konservasi kehutanan, karena penelitian telah menunjukkan hasil konservasi yang lebih baik di daerah di mana perempuan bermakna terlibat dalam membuat keputusan.

Memadukan gender, kehutanan, dan korupsi dalam penelitian dan analisis akademis melalui ekofeminisme

Ekofeminisme adalah kerangka teori yang mengkaji hubungan antara diskriminasi gender dan degradasi lingkungan. Dipelopori oleh Shiva dan Mies, teori ini menyatakan bahwa sistem kekuasaan yang didominasi laki-laki telah menciptakan degradasi lingkungan dan diskriminasi terhadap perempuan.⁹⁷ Ekofeminisme adalah bentuk feminisme radikal yang menentang upaya pengarusutamaan gender ke dalam struktur kekuasaan dan cara kerja dengan pendekatan 'bisnis seperti biasa'. Gerakan ekofeminisme telah mengundang sejumlah perdebatan karena mendorong apa yang sebagian feminis anggap sebagai stereotip, pandangan esensialis yang

97. Mies dan Shiva (1993).

menganggap perempuan memiliki hubungan lebih dekat, bahkan mistis, dengan alam dan lingkungan.⁹⁸

Namun pandangan kembali mengemuka sebagai bentuk ekologi politik feminis, terutama di kalangan aktivis. Memang, kemajuan yang telah dicapai sejauh ini dalam mengintegrasikan gender dan keperhatian kaum perempuan dalam wacana lingkungan merupakan jasa ekofeminisme.⁹⁹ Gerakan 'Merangkul Pohon' Chipko, gerakan sosial dan ekologi tanpa kekerasan yang dimulai pada 1970 di Uttar Pradesh, India, adalah salah satu contoh awal ekofeminisme dalam tindakan nyata. Dalam protes pertama, di desa Mandal tahun 1973, para perempuan memeluk pohon secara harfiah sebagai taktik untuk mencegah penebangan, yang mereka yakini telah berkontribusi terhadap banjir parah di wilayah tersebut beberapa tahun sebelumnya, pada 1970.¹⁰⁰

Gerakan Sabuk Hijau yang dimotori almarhum Wangari Maathai adalah contoh sukses lain dari inisiatif ekofeminisme. Gerakan ini telah mengilhami gerakan serupa di seluruh benua Afrika yang dikenal sebagai Kolektif Ekofeminis Afrika, yang mengampanyekan tradisi feminisme radikal Afrika sebagai dasar untuk mengkritik kekuasaan, menentang kapitalisme multinasional dan efek merusak terhadap lingkungan, dan menata kembali dunia yang lebih adil.¹⁰¹

Ekofeminisme mengingatkan bahwa mendorong lebih banyak perempuan menduduki kekuasaan tidak serta merta mengurangi korupsi. Struktur kekuasaan juga harus berpihak pada rakyat dan demokratis.

Ekofeminisme memberikan kerangka penting untuk mengkaji bagaimana mengintegrasikan gender ke dalam penelitian anti-korupsi, penyusunan kebijakan, dan aktivisme di sektor kehutanan. Dengan mengkritisi struktur kekuasaan dan model tata kelola yang ada, ekofeminisme mengingatkan

98. Lihat, misalnya, Moore (2004, 2008).

99. Buckingham (2004).

100. Jain (1984).

101. Merino (2017).

bahwa mendorong lebih banyak perempuan berada dalam posisi kekuasaan tidak selalu mengurangi korupsi. Kecuali, ada upaya mendorong perubahan struktur dan budaya kekuasaan yang memungkinkan kekuatan dijalankan dengan cara-cara yang berpihak pada rakyat dan demokratis. Pandangan ini sejalan dengan gagasan Gaventa tentang perlunya memperhatikan dinamika kekuasaan dalam ruang partisipasi.¹⁰² Ekofeminisme selalu menginterogasi kekuasaan dan dapat membantu mempertajam pandangan bahwa korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan adalah fenomena patriarkal. Peneliti feminis dapat berkontribusi pada perdebatan gender dan korupsi dengan melakukan penelitian dan menginterogasi bagaimana peran struktur kekuasaan, yang mengabaikan perempuan, kamu muda, penyandang cacat, serta etnis, ras, dan orientasi seksual minoritas, terhadap kian merajalelanya korupsi, deforestasi, dan efek negatif pembangunan lainnya.

Peneliti dapat membantu memperjelas bagaimana laki-laki dan perempuan terlibat pada berbagai tahap rantai pasokan hasil hutan kayu dan non-kayu, dan mengidentifikasi titik-titik di mana korupsi, eksploitasi, dan penyalahgunaan lazim terjadi. Riset etnografi tentang efek degradasi hutan pada laki-laki dan perempuan, dan kelompok rentan seperti masyarakat adat, juga akan membantu. Penelitian interseksional yang mengkaji tidak hanya gender tetapi juga faktor seperti usia, agama, status disabilitas, orientasi seksual, latar belakang etnis, dan pencapaian pendidikan sebagai variabel partisipasi kehutanan akan memungkinkan pembuat kebijakan menghasilkan solusi yang lebih efektif pada sektor ini. Apalagi, kian banyak pelaku pembangunan, termasuk pemerintah, donor, dan LSM, sudah menunjukkan komitmen terhadap kesetaraan dan inklusivitas gender.

Pembuat kebijakan dapat memberikan solusi yang lebih efektif menggunakan penelitian interseksional yang mengkaji tidak hanya gender, tetapi juga usia, agama, status disabilitas, orientasi seksual, latar belakang etnis, dan pendidikan.

102. Gaventa (2006); Gaventa dan Martorano (2016).

Mengintegrasikan gender ke dalam analisis ekonomi politik dan kekuasaan serta pengaruh di sektor kehutanan

Dalam beberapa waktu terakhir, praktisi pembangunan telah mengakui bahwa menerapkan pendekatan yang mempertimbangkan aspek politik dalam program pembangunan dapat membantu meningkatkan efektivitas. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap relasi kuasa dan pengaruh untuk menentukan program apa yang layak dicapai, intervensi apa yang perlu diambil, dan siapa aktor yang perlu dilibatkan. Selain itu, banyak program pembangunan mencoba mengadopsi pendekatan 'sadar gender', yang sering melibatkan analisis gender dan pengarusutamaan gender dalam program.

Namun, riset terbaru oleh proyek Gender dan Praktik Politik di Program Kepemimpinan Pembangunan, menemukan aspek gender jarang diintegrasikan ke dalam pemrograman yang sadar politik dan 'kedua pendekatan ini cenderung beroperasi pada trek parallel- yang merugikan keduanya'¹⁰³ Para peneliti tersebut mencatat karena kedua pendekatan bertujuan menganalisis dan mereformasi dinamika kekuasaan yang tidak setara untuk mencapai perubahan, membawa mereka bersama-sama akan mendorong program pembangunan yang lebih transformatif.

Gender dapat diintegrasikan ke dalam analisis politik dan tata kelola di sektor kehutanan dengan mempertimbangkan hal berikut:

- Peran gender dalam masyarakat dan bagaimana ia membentuk lembaga, sikap, dan faktor ekonomi seperti kepemilikan tanah dan properti/usaha oleh kaum perempuan di sepanjang rantai pasokan kayu.
- Bagaimana peran dinamika gender di sektor ini, misalnya, apa yang dianggap pekerjaan perempuan dan pekerjaan laki-laki, dan dampak dari pandangan tersebut pada pembangunan nasional.
- Sejauh mana perempuan memegang posisi kekuasaan dan pengaruh, misalnya, berapa banyak perempuan duduk di parlemen dan berapa banyak yang menjadi pemimpin di dunia usaha atau masyarakat sipil yang bergerak di sektor kehutanan dan sektor terkait lainnya.
- Tantangan yang dihadapi perempuan dan laki-laki dalam mengakses posisi kekuasaan, dan apakah perempuan yang memegang tampuk kekuasaan benar-benar memiliki pengaruh dalam kebijakan kehutanan.

103. Derbyshire dkk. (2018).

- Representasi dan pengaruh kelompok perempuan, apakah ada kelompok lobi terhadap hak-hak perempuan, dan berapa banyak kesuksesan yang mereka capai dalam perjuangan mereka.
- Bagaimana situasi politik dan ekonomi mempengaruhi laki-laki dan perempuan secara berbeda di semua tingkatan, dari tingkat nasional hingga rumah tangga.¹⁰⁴

Mendorong pendekatan sadar dan inklusif gender untuk inisiatif anti-korupsi kehutanan

Program anti-korupsi kehutanan harus mengadopsi pendekatan yang lebih sadar gender. Pada tingkat internasional, *Environment and Gender Index* (EGI), yang dikembangkan *International Union for Conservation of Nature* (IUCN), adalah alat baru untuk memantau kemajuan menuju kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam konteks perjanjian lingkungan global. Diujicobakan pada 2013, alat ini menjadi titik masuk praktis untuk secara komprehensif memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan pengarusutamaan gender. Pada saat ini, EGI disusun berdasarkan Konvensi Rio tentang keanekaragaman hayati, perubahan iklim, dan desertifikasi,¹⁰⁵ yang lintas-acuan dengan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). EGI memberikan informasi dan data kuantitatif tentang kinerja pemerintah dalam menerjemahkan mandat gender dan lingkungan pada tiga Konvensi Rio dan CEDAW ke dalam kebijakan dan perencanaan nasional. Indeks ini memiliki dua aspek: kebijakan lingkungan responsif gender dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Indikator juga mencakup dimasukkannya gender dalam rencana nasional atau laporan terkait dengan Konvensi Rio, dimasukkannya lingkungan dalam rencana yang berkaitan dengan gender, dan partisipasi perempuan dalam lingkungan pengambilan keputusan.¹⁰⁶

Salah satu tujuan EGI adalah mempromosikan peningkatan budaya transparansi dan akuntabilitas; namun, ini tampak hanya fokus pada bidang kesetaraan gender dan hak-hak perempuan dan bukan pada tata kelola atau lingkungan nasional. Indikator tata kelola menilai efektivitas kapasitas

104. Browne (2014a, 2014b); Griffin (2007). Lihat juga Peterson (2005) dan Pettit (2013).

105. Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati, Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim, dan Konvensi PBB untuk Memerangi Desertifikasi semuanya berasal dari KTT Bumi 1992 yang berlangsung di Rio de Janeiro, Brasil.

106. IUCN (tanpa tahun;).

kelembagaan mendasar suatu negara dan kemampuan warga berpartisipasi secara bebas dalam proses politik. Mereka mengukurnya dengan mempertimbangkan status kebebasan sipil, stabilitas politik, dan hak milik. EGI ini mempertimbangkan pentingnya gender dalam kegiatan yang dilaporkan negara pada Konvensi Rio dan mengkaji apakah laporan CEDAW berisi informasi tentang kelestarian lingkungan. Di masa depan, EGI bisa memperluas indikator tata kelola yang mereka gunakan dengan memasukkan perhatian terhadap anti-korupsi, transparansi dan akuntabilitas (ACTA) dalam tata kelola. Hal ini sangat penting karena korupsi merupakan salah satu ancaman terbesar bagi tata kelola sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan.

Inisiatif tata kelola kehutanan tingkat internasional lainnya seperti REDD+ dan FLEGT telah mengakui pentingnya gender dan inklusi.¹⁰⁷ FLEGT mendorong penelitian untuk memeriksa keterlibatan perempuan dalam rantai pasokan kayu sehingga kebutuhan dan keprihatinan mereka dapat dimasukkan ke dalam proses FLEGT.¹⁰⁸

Mekanisme pengelolaan hutan oleh masyarakat (hutan kemasyarakatan) harus memastikan keseimbangan gender disertai dengan peningkatan kapasitas dan kewenangan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. contohnya melalui penganggaran partisipatif.

Pada tingkat nasional, mekanisme kehutanan masyarakat harus memastikan keseimbangan gender dan harus dilengkapi, dilatih, dan berwenang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui mekanisme akuntabilitas sosial seperti penganggaran partisipatif, audit partisipatif, kartu skor masyarakat, dan mekanisme umpan balik lainnya. Seperti disebutkan sebelumnya, partisipasi tidak boleh sekedar pelengkap, tapi juga harus bermakna. Partisipasi tokenistik dapat terjadi dalam beberapa cara, misalnya, perempuan terlambat dilibatkan dalam proses, tidak diberi

107. *EU FLEGT Facility* (2019b).

108. Yirrah (2018).

informasi memadai tentang proses, dan terdegradasi menjadi pengamat terisolir atau peran penasehat *ad hoc*.¹⁰⁹ Gambar 2 menyajikan kerangka untuk partisipasi bermakna yang dikembangkan oleh gerakan perempuan untuk perdamaian dan resolusi konflik.

Partisipasi dalam penganggaran dan perencanaan dinilai sebagai cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dan memberantas korupsi. Penganggaran partisipatif dapat dibuat lebih responsif gender dengan memperkenalkan penganggaran responsif gender. Organisasi masyarakat sipil seperti Oxfam telah berada di lini depan mempromosikan penganggaran responsif gender, yang melibatkan analisis anggaran pemerintah terhadap efek gendernya pada perempuan dan laki-laki dan norma-norma serta peran yang dikaitkan kepada mereka. Upaya ini juga melibatkan pembuatan perubahan anggaran untuk menjamin komitmen kesetaraan gender diwujudkan. Penganggaran responsif gender mengkaji bagaimana pendapatan diperoleh (pajak, biaya, denda, dll) dan bagaimana mereka digunakan (melalui 'surge pajak', penghindaran pajak, dan arus keuangan terlarang lainnya); bagaimana uang dibelanjakan (misalnya, pada pelayanan publik atau infrastruktur); dan apakah pengeluaran yang sebenarnya sejalan dengan anggaran yang disepakati. Hal ini juga mempertimbangkan apakah pengeluaran cukup dan ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan praktis dan strategis laki-laki, perempuan, anak perempuan, dan anak laki-laki, dan bagaimana keputusan menaikkan dan menghabiskan anggaran mempengaruhi peran gender, seperti pekerjaan perawatan yang tidak dibayar serta kerja subsisten dan distribusinya antar gender.¹¹⁰ Karena itu, Penganggaran Responsif Gender di sektor kehutanan bisa menjadi alat penting untuk mengintegrasikan gender ke dalam program-program anti-korupsi sektor kehutanan.

109. *UN Women* (2018).

110. *Oxfam International* (2018).

Gambar 2: Komponen partisipasi bermakna



Sumber: Diadaptasi dari UN Women (2018).

Mekanisme pengungkapan rahasia dan keluhan, termasuk melaporkan pelecehan dan kekerasan seksual, harus disediakan bagi laki-laki dan perempuan. Di banyak tempat, perempuan memiliki tingkat literasi yang lebih rendah dan/atau kekurangan akses ke mekanisme berbasis teknologi untuk melaporkan kesalahan. Mereka kadang lebih suka melaporkan secara tatap muka, dibanding membuat panggilan telepon atau mengirim catatan lewat surat, serta preferensi dan keterbatasan harus diperhitungkan.

Akses informasi sangat penting untuk kesetaraan dan akuntabilitas gender. Data kehutanan terbuka akan meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam mencari solusi terhadap masalah-masalah di sektor ini. Data bisa menyertakan gambar satelit dari tutupan hutan, informasi tentang izin dan konsesi, serta informasi mengenai anggaran, sumber daya, dan staf. Masyarakat dan organisasi masyarakat sipil memerlukan informasi ini untuk memobilisasi pemberantasan praktik-praktik seperti pembalakan liar yang mengancam mata pencaharian mereka,

sehingga data yang terbuka ramah telepon pintar dan mudah diakses. Dalam kasus apapun, informasi harus dalam format yang dapat mudah diakses oleh kedua jenis kelamin, dengan mempertimbangkan melek huruf dan akses ke teknologi.

Pendekatan sadar gender di sektor kehutanan juga akan memberi kesempatan melihat secara mendalam dinamika gender pada rantai pasokan kayu. Ini bisa termasuk mengungkap aspek gender korupsi, dari *sextortion* hingga perbudakan modern, dalam rantai pasokan dan menciptakan upaya pemberantasan terhadap praktik-praktik tersebut.¹¹¹

Tabel 2 menggambarkan kerangka inisiatif anti-korupsi kehutanan berdasarkan empat pilar transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan mekanisme dan tindakan anti-korupsi, dengan beberapa pendekatan spesifik yang disarankan pada masing-masing pilar.

Tabel 2: Usulan kerangka anti-korupsi yang sensitif gender untuk sektor kehutanan

TRANSPARANSI	AKUNTABILITAS	PARTISIPASI	ANTI KORUPSI
Mendorong data kehutanan terbuka dan memastikan informasi dapat diakses laki-laki dan perempuan (mengingat akses teknologi informasi, tingkat melek huruf)	Memperjelas garis tanggung jawab dan pelaporan Membangun kapasitas sektor memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 6 (kesetaraan gender) dan 16 (perdamaian, keadilan, lembaga yang kuat)	Menjadikan partisipasi laki-laki dan perempuan di sektor hukum menjadi prasyarat yang dijamin UU Menyeimbangkan pemangku kepentingan dalam pembuatan kebijakan dan undang-undang, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan laki-laki dan perempuan	Memperkuat mekanisme peraturan dan sistem keadilan dan membuat mereka sensitif gender dengan melibatkan massa kritis perempuan yang mampu mempengaruhi keputusan dan proses
Mempublikasikan proposal dan rencana dalam format yang mudah diakses	Membangun kapasitas sektor melaporkan tentang kewajiban hukum internasional, termasuk masalah lingkungan di CEDAW dan masalah gender di UNCAC	Menggunakan mekanisme partisipatif yang mencakup perwakilan dari kelompok rentan, seimbang gender, dan memiliki perlindungan dari <i>elite capture</i>	Melembagakan perekrutan berdasarkan kapasitas di sektor kehutanan dan memastikan staf dilatih tentang gender, kehutanan, dan korupsi
Mengembangkan strategi advokasi dan terlibat dengan media		Memampukan anggota memahami isu-isu yang	Memperkuat hubungan antara mekanisme kehutanan, badan
Mempublikasikan hasil penelitian dengan cara yang mudah diakses			
Mendorong			

111. Hussain (2019).

TRANSPARANSI	AKUNTABILITAS	PARTISIPASI	ANTI KORUPSI
<p>penganggaran partisipatif responsif gender dengan menggabungkan penganggaran gender dan penganggaran responsif gender umum</p>	<p>Menjamin transparansi dalam pengelolaan keuangan dan pengadaan</p> <p>Membangun mekanisme <i>whistleblowing</i> dan keluhan yang peka gender, termasuk tentang pelecehan seksual dan kekerasan</p> <p>Mendorong standarisasi dan keadilan prosedural dalam administrasi pengambilan keputusan</p>	<p>dipertaruhkan sehingga dapat meningkatkan perhatian mereka</p> <p>Memastikan mekanisme pengaduan memiliki ruang umpan balik</p> <p>Melatih dan melengkapi kelompok pengguna dan masyarakat mekanisme pemantauan untuk menjadi inklusif dan efektif</p> <p>Menciptakan mekanisme partisipatif yang dapat mengatasi kesenjangan gender dan masalah korupsi</p>	<p>anti-korupsi, dan badan pengarusutamaan gender</p> <p>Mempublikasikan kode etik bagi rimbawan dan anggota kelompok pengelola hutan, yang melarang konflik kepentingan dan bentuk perilaku korup lain</p>

Sumber: Diadaptasi dari Water Integrity Network's Integrity Wall.

Mendorong keterlibatan perempuan dalam gerakan anti-korupsi di sektor kehutanan

Seperti disebutkan sebelumnya, perempuan telah aktif dalam gerakan lingkungan selama beberapa dekade, dan gerakan sosial anti-korupsi yang dipimpin kelompok-kelompok perempuan telah lahir. Salah satu contohnya adalah Saya Perempuan Anti-Korupsi (SPAK) di Indonesia, yang diluncurkan pada 2014. Dengan lebih dari 1.025 kader SPAK aktif di seluruh provinsi di Indonesia, SPAK adalah salah satu gerakan sosial terbesar anti-korupsi yang dipimpin perempuan yang ada saat ini. Gerakan ini menyasar perempuan dari berbagai lapangan pekerjaan dan latar belakang profesional untuk menjadi anggota. Para perempuan anggotanya mengikuti pelatihan tiga hari untuk membangun pemahaman tentang berbagai bentuk korupsi; mereka berkomitmen untuk bebas korupsi dan melakukan yang terbaik untuk memberantas korupsi di keluarga, komunitas, dan masyarakat lebih luas.¹¹² Gerakan tersebut dapat dan harus didorong untuk mengatasi korupsi terkait kehutanan sebagai bagian dari tujuan mereka.

112. UNODC (2018).

Namun inisiatif mendorong perempuan sebagai pegiat anti-korupsi harus dirancang seksama untuk menghindari memperkuat stereotip gender tentang integritas perempuan yang lebih tinggi dan cenderung lebih menghindari perilaku curang. Dengan demikian, setiap proyek harus didahului dengan latihan analisis gender yang mengkaji hubungan gender dan stereotip gender, dan harus ada rencana untuk mengurangi konsekuensi berbahaya yang tidak diinginkan.

Manajemen risiko korupsi untuk pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender program di sektor kehutanan

Diskusi sejauh ini berfokus pada bagaimana mengintegrasikan gender ke dalam inisiatif dan program anti-korupsi kehutanan. Konsekuensinya, penting bagi kegiatan perempuan di sektor kehutanan untuk mempertimbangkan korupsi sebagai ancaman terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Seperti dibahas di atas, korupsi di kehutanan memiliki dampak tak proporsional terhadap perempuan. Karena itu, risiko korupsi harus dipertimbangkan ketika merancang dan menerapkan inisiatif yang bertujuan memberdayakan perempuan dan mempromosikan kesetaraan gender di sektor kehutanan. Hal ini dapat dilakukan dengan menggabungkan prinsip-prinsip manajemen risiko korupsi dalam analisis gender, seperti ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3: Memasukkan korupsi dalam analisis gender

Pertimbangan analisis gender	Aspek potensi korupsi
Stereotip peran gender	Bagaimana stereotip dan norma-norma tentang maskulinitas dan feminitas mempengaruhi perilaku korup?
Kondisi, kebutuhan, dan kendala laki-laki dan perempuan	Bagaimana penyalahgunaan kekuasaan (korupsi) berdampak pada kehidupan laki-laki dan perempuan dan bisa memperburuk situasi mereka?
Tingkat partisipasi dan kekuasaan laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan	Bagaimana korupsi, patronase, dan klientelisme sebagai fenomena patriarkal mempengaruhi laki-laki dan kemampuan perempuan berpartisipasi dalam kehidupan publik dan pengambilan keputusan?
Akses laki-laki dan perempuan ke dan pengendalian sumber daya Interseksionalitas: pengaruh ras, etnis, usia, kelas, pendapatan, tingkat pendidikan, status disabilitas, dll, pada semua faktor di atas	Bagaimana korupsi membatasi akses laki-laki dan perempuan serta kontrol atas sumber daya produktif?
Interseksionalitas: pengaruh ras, etnis, usia, kelas, pendapatan, tingkat pendidikan, status disabilitas, dll, pada semua faktor di atas	Bagaimana korupsi berdampak pada kelompok terpinggirkan dan rentan?

Rekomendasi

Donor dan badan-badan multilateral

Donor berada di posisi tepat untuk menadani inisiatif yang mempromosikan pendekatan sensitif gender upaya anti-korupsi di sektor kehutanan. Donor dapat:

- Mendukung upaya oleh badan-badan internasional dan multilateral untuk mengintegrasikan pertimbangan gender dan tindakan anti-korupsi dalam inisiatif sektor kehutanan internasional.
- Mendukung upaya pemerintah mengarusutamakan upaya gender dan anti-korupsi di sektor kehutanan.
- Mendukung organisasi masyarakat sipil yang bekerja di isu gender dan kehutanan, membantu mereka mengadopsi pendekatan gender dan korupsi terpadu.
- Mendukung penelitian akademik tentang korupsi berbasis gender dan dampak korupsi berbasis gender di sektor kehutanan.

Pemerintah

Pemerintah memiliki tanggung jawab utama mengadopsi pendekatan sensitif gender terhadap upaya anti-korupsi kehutanan. Untuk itu, mereka dapat:

- Mengintegrasikan pertimbangan gender dan inisiatif anti-korupsi dalam strategi dan rencana sektor kehutanan.
- Mewajibkan partisipasi perempuan dalam kelompok pengguna hutan dan memastikan partisipasi bermakna dari semua kelompok.
- Mengaktifkan dan mendorong perempuan mengikuti berbagai profesi dan kegiatan yang berhubungan dengan kehutanan.
- Memastikan kompilasi data terpilah gender tentang penggunaan hutan, rantai pasokan kehutanan, dan mekanisme tata kelola hutan.

Aktivis, LSM, dan organisasi masyarakat sipil

Seperti disebutkan di atas, pemberantasan korupsi merupakan agenda perjuangan feminis karena korupsi berdampak tidak proporsional terhadap perempuan. LSM dan aktivis hak-hak perempuan harus:

- Mengkaji bagaimana korupsi menghalangi tujuan proyek mereka dan termasuk memberantas korupsi sebagai bagian dari tujuan proyek mereka untuk meningkatkan kesetaraan gender.
- Mengadopsi atau berkontribusi pada metode anti-korupsi yang ada seperti penganggaran partisipatif, dan membuatnya lebih responsif gender.
- Bertindak sebagai *whistleblower* tentang pembalakan liar dan bentuk-bentuk lain dari korupsi kehutanan.
- Mengumpulkan data terpilah gender tentang pemanfaatan hutan dan korupsi kehutanan serta pengaruhnya terhadap masyarakat sebagai bagian dari kegiatan pemantauan mereka.

Peneliti dan ilmuwan

Perlu penelitian lebih lanjut tentang hubungan gender, kehutanan, dan korupsi. Pertanyaan penelitian potensial meliputi:

- Bagaimana laki-laki dan perempuan terlibat dalam korupsi dan praktik ilegal di sepanjang rantai pasokan kehutanan di sektor informal, sektor swasta, dan sektor publik?
- Apa efek korupsi kehutanan pada laki-laki dan perempuan?
- Apakah ada hubungan kausal antara gender dalam pengambilan keputusan dan pengendalian korupsi (seperti ditunjukkan analisis regresi)?
- Kondisi apa yang meningkatkan jumlah perempuan terlibat dalam pengelolaan hutan masyarakat dan pengambilan keputusan menyebabkan penurunan pembalakan liar?
- Bagaimana peran perempuan dalam upaya Pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor kehutanan.

Referensi

- Abbot, J., et al. 2001. Understanding the links between conservation and development in the Bamenda Highlands, Cameroon. *World Development* 29(7): 115–36.
- African Women’s Network for Community Management of Forests. 2014. The role of women in deforestation and forest degradation in Liberia: A case study of women’s perception in Gbarpolu County.
- Agarwal, B. 2009. Gender and forest conservation: The impact of women’s participation on community forest governance. *Ecological Economics* 68(1): 2785–2799.
- Agarwal, B. 2010a. Does women’s proportional strength affect their participation? Governing local forests in South Asia. *World Development* 38(1): 98–112.
- Agarwal, B. 2010b. Gender and green governance: The political economy of women’s presence within and beyond community forestry. Oxford University Press.
- Alatas, V., et al. 2009. Gender, culture and corruption: Insights from an experimental analysis. *Southern Economic Journal* 75(3): 663–680.
- Alhassan-Alolo, N. 2007. Gender and corruption: Testing the new consensus. *Public Administration* 27(1): 227–237.
- Arumingtyas, L. 2017. In rural Indonesia, women spearhead the fight to protect nature. *Mongabay News*, 27 December.
- Assemble-Mvondo, S. 2015. National-level corruption risks and mitigation strategies in the implementation of REDD+ in the Democratic Republic of the Congo: An overview of the current situation. U4 Issue 2015:9. Bergen, Norway: U4 Anti-Corruption Resource Centre, Chr. Michelsen Institute.

Bauhr, M., Charron, N., and Wängnerud, L. 2019. Exclusion or interests? Why females in elected office reduce petty and grand corruption. *European Journal of Political Research* 58(4): 1043–1065.

Bhalla, P. 2016. Gender dynamics in Odisha's Forest Rights Act. Chapter 11 in Colfer, Basnett, and Elias 2016.

Bjarnegård, E. 2013. Gender, informal institutions and political recruitment: Explaining male dominance in parliamentary representation. Palgrave Macmillan.

Blaser, J. and Zabel, A. 2016. Forest crime in the tropics. In Tropical forestry handbook, Pancel, L. and Köhl, M. (eds.). Springer.

Boehm, F. 2015. Are men and women equally corrupt? U4 Brief 2015:6. Bergen, Norway: U4 Anti-Corruption Resource Centre, Chr. Michelsen Institute.

Bolanos, O. and Schmink, M. 2005. Women's place is not in the forest: Gender issues in a timber management project in Bolivia. In The equitable forest: Diversity, community and resource management, Colfer, C. J. P. (ed.). Resources for the Future and Center for International Forestry Research.

Bonan, G. 2008. Forests and climate change: Forcings, feedbacks, and the climate benefits of forests. *Science* 320(5882): 1444–1449.

Browne, E. 2014a. Gender in political economy analysis. GSDRC Helpdesk Research Report 1071, University of Birmingham.

Browne, E. 2014b. Gender: The power relationship that political economy analysis forgot? Developmental Leadership Program, 13 February.

Bryan, E. and Behrman, J. 2013. Community-based adaptation to climate change: A theoretical framework, overview of key issues and discussion of gender differentiated priorities and participation. CAPRI Working Paper 109, International Food Policy Research Institute.

Buckingham, S. 2004. Ecofeminism in the twenty-first century. *Geographical Journal* 170(2): 146–154.

Carr, M. and Hartl, M. 2010. Lightening the load: Labour-saving technologies and practices for rural women. International Fund for Agricultural Development (IFAD).

CIFOR (Center for International Forestry Research). 2013. Gender analysis in forestry research: What policymakers should know. Factsheet 7.

CIFOR. 2016. Gender in forestry and REDD+ in Indonesia.

Coleman, E. A. and Mwangi, E. 2013. Women's participation in forest management: A cross-country analysis. *Global Environmental Change* 23(1): 193–205.

Colfer, C. J. P., Basnett, B. S., and Elias, M. 2016. Gender and forests: Climate change, value chains, tenure and emerging issues. Routledge.

Dauvergne, P., and Lister, J. 2011. 7 ways to stop tropical deforestation and illegal logging. *Ecologist*, 11 March.

Dei, G. J. S. 1994. The women of a Ghanaian village: A study of social change. *African Studies Review* 37(2): 121–145.

Denton, F. 2002. Climate change vulnerability, impacts, and adaptation: Why does gender matter? *Gender & Development* 10(2): 10–20.

Derbyshire, H., et al. 2018. Politically informed, gender aware programming: Five lessons from policy and practice. Development Leadership Program, Gender and Politics in Practice.

Dollar, D., Fisman, R., and Gatti, R. 2001. Are women really the 'fairer' sex? Corruption and women in government. *Journal of Economic Behavior & Organization* 46(4): 423–429.

Dupuy, K. 2014. Corruption risks and experiences in REDD+ financial benefit sharing mechanisms. U4 Brief 2014:11. Bergen, Norway: U4 Anti-Corruption Resource Centre, Chr. Michelsen Institute.

Esarey, J. and Chirillo, G. 2013. 'Fairer sex' or purity myth? Corruption, gender and institutional context. *Gender and Politics* 9(4): 390–413.

Esarey, J. and Schwindt-Bayer, L. 2017. Women's representation, accountability and corruption in democracies. *British Journal of Political Science* 48(3): 659–690.

EU FLEGT Facility. 2019a. FLEGT and VPA countries.

EU FLEGT Facility. 2019b. Gender dimensions of SMEs and VPAs.

European Commission. 2019. FLEGT regulation: FLEGT Voluntary Partnership Agreements.

FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). 2011. The role of women in agriculture. *ESA Working Paper 11-02*.

FAO. 2019. How to mainstream gender in forestry: A practical field guide.

FAO. n.d. Women in forestry: Challenges and opportunities.

FC and IUCN (Forestry Commission of Ghana and International Union for Conservation of Nature). n.d. A roadmap to mainstreaming gender considerations into Ghana's Redd+ process.

Fraser, B. 2014. Experts: Local activism, political measures needed to stop illegal timber. *Forest News*, 23 July. Center for International Forestry Research.

Funoh, K. N. 2014. The impacts of artisanal gold mining on local livelihoods and the environment in the forested areas of Cameroon. Working Paper 150, Center for International Forestry Research.

Gaventa, J., 2006. Finding the spaces for change: a power analysis. *IDS Bulletin* 37(6): 23–33.

Gaventa, J. and Martorano, B. 2016. Inequality, power and participation: Revisiting the links. *IDS Bulletin* 47(5): 11–29.

Global Witness. 2015. Exporting impunity: How Congo's rain forest is illegally logged for international markets.

Goetz, A. M. 2007. Political cleaners: Women as the new anti-corruption force? *Development and Change* 38(1): 87–105.

Griffin, P. 2007. Refashioning IPE: What and how gender analysis teaches international (global) political economy. *Review of International Political Economy* 14(4): 719–736.

Hallerod, B., et al. 2013. Bad governance and poor children: A comparative analysis of government efficiency and severe child deprivation in 68 low- and middle-income countries. *World Development* 48 (August): 19–31.

Harris-Fry, H. and Grijalva-Eternord, C. 2016. Forest conservation in Central and West Africa: Opportunities and risks for gender equity. Chapter 6 in Colfer, Basnett, and Elias 2016.

Hoskins, M. W. 2016. Gender and the roots of community forestry. Chapter 2 in Colfer, Basnett, and Elias 2016.

Hussain, H. 2019. Gender-smart open contracting: Empowering communities and enabling inclusive growth. *Open Contracting Partnership*, 8 March.

IAWJ (International Association of Women Judges). 2012. Stopping the abuse of power through sexual exploitation: Naming, shaming and ending sextortion.

Ihalainen, M., et al. 2018. Women producing charcoal in Zambia. *Forest News*, 15 January. Center for International Forestry Research.

Ingram, V., et al. 2011. Where artisanal mines and forest meet: Socio-economic and environmental impacts in the Congo Basin. *Natural Resources Forum* 35(4): 304–320.

Interpol. 2016. Uncovering the risks of corruption in the forestry sector.

IUCN (International Union for Conservation of Nature). n.d. The Environment Gender Index. Factsheet.

- Jain, S. 1984. Women and people's ecological movement: A case study of women's role in the Chipko Movement in Uttar Pradesh. *Economic and Political Weekly* 19(41): 1788–1794.
- Kennedy, V. 2016. Living conservation values: Women and conservation easement protection in central New York. Chapter 3 in Colfer, Basnett, and Elias 2016.
- Kenya Ministry of Environment, Water and Natural Resources. 2013. A corruption risk assessment of REDD+ in Kenya. Kenya REDD+ Analytical Series, no. 1. UN REDD+, U4, UNDP, and UNEP.
- Khadka, M., et al. 2014. Gender equality challenges to the REDD initiative in Nepal. *Mountain Research and Development* 34(3): 197–207.
- King, E. and Mason, A. 2001. Engendering development: Through gender equality in rights, resources, and voice. World Bank.
- Kishor, N. and Damania, R. 2007. Crime and justice in the Garden of Eden: Improving governance and reducing corruption in the forestry sector. In The many faces of corruption: tackling vulnerabilities at the sector level, Campos, E. J. and Pradhan, S. (eds.). *Poverty Reduction and Economic Management*, World Bank.
- Kleinschmit, D., Mansourian, S., Wildburger, C., and Purret, A., eds. 2016. Illegal logging and related timber trade: Dimensions, drivers, impacts and responses. A Global Scientific Rapid Response Assessment Report. IUFRO World Series vol. 35. Vienna: International Union of Forest Research Organizations (IUFRO).
- Koyuncu, C. and Yilmaz, R. 2009. The impact of corruption on deforestation: A cross-country evidence. *Journal of Developing Areas* 42(2): 213–222.
- KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). 2013. Kajian Kerentanan korupsi dalam perizinan usaha sektor kehutanan. Direktorat Penelitian dan Pengembangan, Jakarta.
- KPK. 2015. Mencegah kerugian negara di sektor kehutanan. Sebuah kajian tentang sistem penerimaan negara buka

n pajak dan penatausahaan kayu. Direktorat Penelitian dan Pengembangan, Jakarta.

LaCerva, G. 2016. Untamed and rare: Access and power in DRC's emerging luxury bushmeat trade. Chapter 14 in Colfer, Basnett, and Elias 2016.

Larson, A. M., et al. 2016. Gender gaps in REDD+: Women's participation is not enough. Chapter 5 in Colfer, Basnett, and Elias 2016.

Leach, M. 1991. Engendered environments: Understanding natural resource management in the West Africa forest zone. IDS Bulletin 22(4): 17–24.

Leisher, C., et al. 2016. Does the gender composition of forest and fishery management groups affect resource governance and conservation outcomes? A systematic map. Environmental Evidence 5, article 6.

Leone, M. 2019. Women as decision makers in community forest management: Evidence from Nepal. Journal of Development Economics 138: 180–191.

Lucas, A. 2016. Elite capture and corruption in two villages in Bengkulu Province, Sumatra. Human Ecology 44(3): 287–300.

Luttrell, C., et al. 2011. Lessons for REDD+ from measures to control illegal logging in Indonesia. Working Paper 74, Center for International Forestry Research.

Maathai, W. 2003. The Green Belt movement: Sharing the approach and the experience. Lantern Books.

Marin, A. B. and Kuriakose, A. T. 2017. Gender and sustainable forest management: Entry points for design and implementation. Climate Investment Funds.

Merino, J. 2017. Women speak: Ruth Nyambura insists on a feminist political ecology. Ms. Magazine, 15 November.

Merkle, O. 2018. The myth of gender-neutral power: Corruption and gender norms. PhD diss., University of Maastricht.

- Meyer, A. L., van Kooten, G. C., and Wang, S. 2003. Institutional, social and economic roots of deforestation: A cross-country comparison. *International Forestry Review* 5(1): 29–37.
- Mies, M. and Shiva, V. 1993. Ecofeminism. Zed Books.
- Moore, N. 2004. Ecofeminism as third wave feminism? Essentialism, activism and the academy. In Third wave feminism: A critical exploration, Gillis, S., Howie, G., and Munford, R. (eds.), 227–239. Palgrave Macmillan.
- Moore, N. 2008. Eco/feminism, non-violence and the future of feminism. *International Feminist Journal of Politics* 10(3): 282–298.
- Mwangi, E. and Mai, Y. H. 2011. Introduction to special issue on forests and gender. *International Forestry Review* 13(2): 119–122.
- Oxfam International. 2018. A guide to gender-responsive budgeting.
- Pendergast, S. M., Clarke, J. A., and Van Kooten, G. C. 2011. Corruption, development and the curse of natural resources. *Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique* 44(2): 411–437.
- Peterson, A. and Merchant, C. 1986. ‘Peace with the earth’: Women and the environmental movement in Sweden. *Women’s Studies International Forum* 9(5–6): 465-479.
- Peterson, S. V. 2005. How (the meaning of) gender matters in political economy. *New Political Economy* 10(4): 499–521.
- Pettit, J. 2013. Power analysis: A practical guide. Sida.
- Samandari, A. M. 2017. Gender-responsive land degradation neutrality. Global Land Outlook Working Paper, United Nations Convention to Combat Desertification.
- Schoepf, B. G. and Schoepf, C. 1988. Land, gender and food security in Easter Kivu, Zaire. In Agriculture, women and land: The African experience, Dawson J. (ed.). Westview Press.

Schroeder, R. A. 1999. Shady practices: Agroforestry and gender politics in the Gambia. University of California Press.

Sierra, E. and Boehm, F. 2015. The gendered impact of corruption: Who suffers more – men or women? U4 Brief 2015:9. Bergen, Norway: U4 Anti-Corruption Resource Centre, Chr. Michelsen Institute.

Standing, A. 2012. Corruption and REDD+: Identifying risks and complexity. U4 Brief 2012:2. Bergen, Norway: U4 Anti-Corruption Resource Centre, Chr. Michelsen Institute.

Sunderland, T., et al. 2014. Challenging perceptions about men, women, and forest product use: A global comparative study. *World Development* 64, suppl. 1: S56–S66.

Sundstrom, A. 2016. Understanding illegality and corruption in forest management: A literature review. QoG Working Paper Series 2016:1, Quality of Government (QoG) Institute, University of Gothenburg.

Sundstrom, A. and Wangnerud, L. 2014. Corruption as an obstacle to women's political representation: Evidence from local councils in 18 European countries. *Party Politics* 22(3): 354–369.

Sung, H. E. 2003. Fairer sex or fairer system? Gender and corruption revisited. *Social Forces* 82(2): 703–723.

Sung, H. E. 2012. Women in government, public corruption, and liberal democracy: A panel analysis. *Crime, Law and Social Change* 58(3): 195–219.

Swamy, A., et al. 2001. Gender and corruption. *Journal of Development Economics* 64(1): 25–55.

Terry, G. 2009. No climate justice without gender justice: An overview of the issues. *Gender & Development* 17(1): 5–18.

Transparency International. 2019. Global Corruption Barometer – Latin American & the Caribbean.

UNEP (United Nations Environment Programme) and Interpol. 2012. Green carbon, black trade: Illegal logging, tax fraud and laundering in the world's tropical forests.

United Nations. 1985. Nairobi Forward-looking Strategies for the Advancement of Women. World Conference to review and appraise the achievements of the United Nations Decade for Women: Equality, development and peace.

UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime). 2012. Wildlife and forest crime analytic toolkit. Revised edition.

UNODC. 2018. Final independent project evaluation of 'Strengthening Anti-Corruption Institutions in Indonesia'.

UN Women. 2018. Women's meaningful participation in negotiating peace and the implementation of peace agreements: Report of the Expert Group Meeting.

Wan, M., Colfer, C. J., and Powell, B. 2011. Forests, women and health: Opportunities and challenges for conservation. *International Forestry Review* 13(3): 369–387.

Watson, D. and Moreland, A. 2014. Perceptions of corruption and the dynamics of women's representation. *Politics and Gender* 10(3): 392–412.

Wornell, E. J., Tickamyer, A. R., and Kusujiartu, S. 2015. Gender mainstreaming principles in Indonesia's REDD+ Program: A document analysis. *Journal of Sustainable Development* 8(8): 159–170.

Wright, S. J., et al. 2007. Poverty and corruption compromise tropical forest reserves. *Ecological Applications* 17(5): 1259–1266.

Yirrah, N. A. 2018. Analysis of gender in the wood processing sector of Ghana. *Growing Responsible Trade.*